



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS LINTAS NEGARA TERHADAP
TINDAKAN ANTIKOMPETITIF PERUSAHAAN AKIBAT
PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL:
PENGUJIAN *INSTITUTIONAL ANOMIE THEORY*

TESIS

GANI GARBADI
1006787501

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INDUSTRI
DEPOK
JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS LINTAS NEGARA TERHADAP
TINDAKAN ANTIKOMPETITIF PERUSAHAAN AKIBAT
PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL:
PENGUJIAN *INSTITUTIONAL ANOMIE THEORY*

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik.

GANI GARBADI
1006787501

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INDUSTRI
KEKHUSUSAN ERGONOMI ORGANISASI
DEPOK
JULI 2012

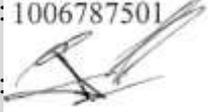
ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gani Garbadi

NPM : 1006787501

Tanda Tangan : 

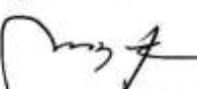
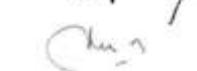
Tanggal : 11 OKTOBER 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Gani Garbadi
NPM : 1006787501
Program Studi : Industri
Judul Tesis : Analisis Lintas Negara Terhadap Tindakan Antikompetitif Perusahaan Akibat Pelanggaran Kekayaan Intelektual: Pengujian *Institutional Anomie Theory*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Industri Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Ir. Erlinda Muslim, MEE ()
Pembimbing II: Prof. Dr. Ir. T. Yuri Zagloel, MEng.Sc. ()
Penguji : Ir. Fauzia Dianawati, MSi ()
Penguji : Ir. Amar Rachman, MEIM ()
Penguji : Ir. Isti Surjandari P., MT, M.A., Ph.D ()
Penguji : Ir. Akhmad Hidayatno, MBT ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Agustus 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan, dan nasihat yang diberikan oleh penasihat penelitian saya, Profesor Ku Chia-Hua. Tanpa bimbingannya tesis ini tidak akan terselesaikan. Sejak awal penelitian saya, dia telah berbaik hati dan sabar dalam membimbing pengetahuannya kepada saya yang saya sangat menghargai setiap kesempatan untuk berdiskusi dengannya. Kerendahan hatinya dan inspirasi oleh sikap hidupnya terungkap ketika dia mentransfer pengetahuannya, dan saya akan tetap berhutang budi kepadanya atas bimbingan dan kebaikannya. Saya juga berterima kasih kepada Profesor Chung-Wen Chen karena telah memberi saya wawasan awal tentang apa penelitian yang saya harus kerjakan, oleh karena itu saya ingin dengan tulus mengakui kebaikan Profesor Chung-Wen Chen dalam membantu saya untuk menetapkan kerangka teoritis dari penelitian saya. Saya dengan rendah hati berterima kasih atas bimbingan dalam membantu memahami sebagian besar pekerjaan yang dilakukan dalam tesis ini.

Saya juga berterima kasih atas dukungan besar dari kedua kampus saya, yakni Universitas Indonesia dan National Taiwan University of Science and Technology dalam member saya kesempatan untuk mengejar program gelar ganda. Tanpa dukungan dan restu dari mereka yang pertama mengundang saya untuk mengejar prestasi akademik di kedua universitas tersebut, Profesor Yuri Zagloel dan Profesor James C. Chen, saya tidak akan pernah membayangkan peluang besar apa yang mungkin terlewatkan bagi pembelajaran dan pengalaman seumur hidup saya.

Kemampuan fenomenal, dedikasi, ketulusan, dan kesabaran telah membantu memperkuat tekad saya dalam mengejar pendidikan saya. Saya berharap bahwa penelitian saya bagi kemajuan ilmiah dan saya berharap untuk bias berkontribusi bagi kemajuan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.

Taipei, 28 Maret 2012



Gani Garbadi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gani Garbadi
NPM : 1006787501
Program Studi : Industri
Departemen : Industri
Fakultas : Teknik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Lintas Negara Terhadap Tindakan Antikompetitif Perusahaan
Akibat Pelanggaran Kekayaan Intelektual:
Pengujian *Institutional Anomie Theory*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 1 Agustus 2012
Yang menyatakan



(Gani Garbadi)

ABSTRAK

Nama : Gani Garbadi
Program Studi : Teknik Industri
Judul : Analisis Lintas Negara Terhadap Tindakan Antikompetitif
Perusahaan Akibat Pelanggaran Kekayaan Intelektual:
Pengujian *Institutional Anomie Theory*

Fokus penelitian ini adalah menyelidiki mengenai kecenderungan perusahaan untuk melakukan perilaku antikompetitif yang diakibatkan oleh pelanggaran kekayaan intelektual mereka. Teori *institutional anomie* digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami dinamika perilaku menyimpang bagi beberapa perusahaan di berbagai negara. Pendekatan multilevel dengan *hierarchical linear modeling* digunakan dalam penelitian ini untuk mendorong dan menyempurnakan premis dasar dari teori *institutional anomie*. Dalam konteks ini, penelitian ini mengedepankan efek utama strata perusahaan dari teori tersebut terhadap perilaku antikompetitif perusahaan dan juga efek moderasi teori tersebut terhadap tingkat kecenderungan perusahaan dalam melakukan perilaku antikompetitif yang diakibatkan oleh pelanggaran kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku antikompetitif muncul ketika perusahaan mengalami pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Beberapa prediktor dari teori *institutional anomie* mendukung sudut pandang ini, sementara prediktor lain termasuk efek utama memberikan wawasan kontras.

Kata kunci:

Antikompetitif, properti intelektual, teori *institutional anomie*, lembaga sosial, kebudayaan nasional

ABSTRACT

Name : Gani Garbadi
Study Program : Industrial Engineering
Title : Cross-National Analysis on Anticompetitive Behavior of Firm Due To Intellectual Property Violation: A Test of Institutional Anomie Theory

Central to this research is to investigate the extent of a firm in engaging anticompetitive behavior due to violations of their intellectual property. Institutional anomie theory is used to provide the theoretical framework on understanding the dynamics of the deviant behavior for firms in several nations. Multilevel approach with the use of hierarchical linear modeling is used in this research to advance and refine the fundamental premises of the institutional anomie theory. Within this context, this research puts forward the firm level main effect of the theory on anticompetitive behavior for firms as well as the moderation effects of the theory towards the extent for firms in engaging anticompetitive behavior due to violations of intellectual property. Results show that anticompetitive behavior inclination arises when firms are experiencing violations to their intellectual property rights. Some national cultures and social institutions moderation predictors of the institutional anomie theory supported this point of view, while others including the main effects provide intriguing insights.

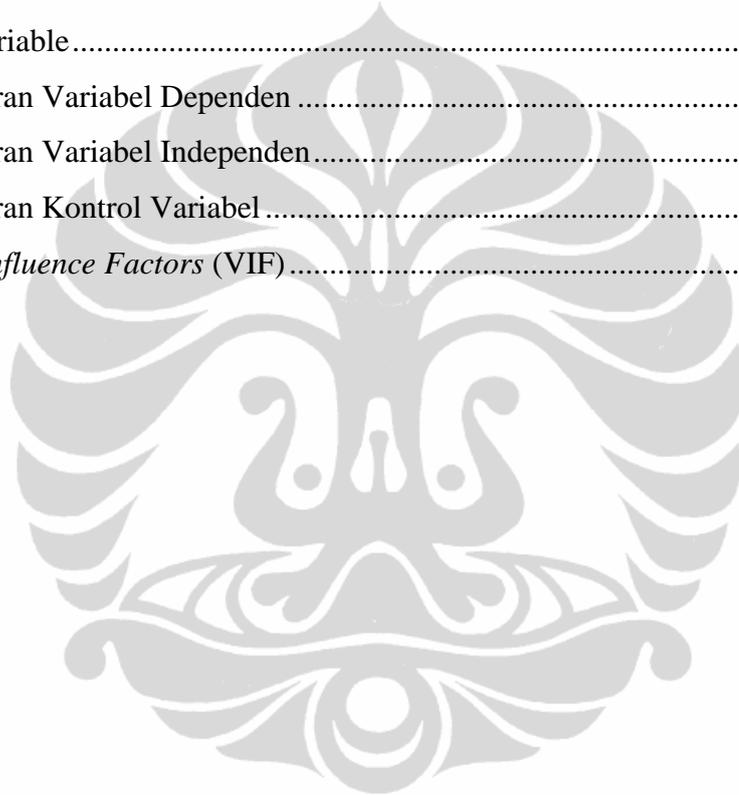
Key words:

Anticompetitive, intellectual property, institutional anomie theory, social institutions, national culture

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Perilaku Anti Persaingan	3
2.2 Pelanggaran Properti Intelektual	6
2.3 Teori Anomi Kelembagaan	9
2.3.1 Budaya Nasional	11
2.3.2 Lembaga Sosial.....	12
BAB 3 PERUMUSAN PENELITIAN	14
3.1 Pertanyaan Penelitian	14
3.2 Hipotesis Penelitian	16
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	25
4.1 Analisis Statistik: Pemodelan Linear Hirarkis	25
4.2 Model Penelitian.....	27
4.3 Variabel Kontrol.....	30
4.4 Sumber Data	31
4.5 Pengolahan Data.....	34
BAB 5 HASIL ANALISA	39
5.1 Hasil Pemodelan Linear Hirarkis	40
5.2 Model Varians	41

5.3 Hasil Uji Hipotesis	41
BAB 6 PEMBAHASAN PENELITIAN	47
6.1 Temuan Penelitian	47
6.2 Kontribusi dan Implikasi	54
6.3 Batasan Penelitian	57
6.4 Saran Penelitian Lanjutan.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	69
Sumber Variable	69
Pengukuran Variabel Dependen	69
Pengukuran Variabel Independen.....	69
Pengukuran Kontrol Variabel	74
<i>Variance Influence Factors (VIF)</i>	75



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Korelasi Tingkat-Silang Pearson ^{a,b}	36
Tabel 5. 1 Hasil analisis HLM pada tindakan anti persaingan	40
Tabel 1 Pelanggaran Properti Intelektual	75
Tabel 2 Orientasi Individualisme	75
Tabel 3 Orientasi Pencapaian	75
Tabel 4 Orientasi Egalitarianisme	75
Tabel 5 Pembangunan Ekonomi.....	76
Tabel 6 Kebijakan Sosialisme	76
Tabel 7 Perpecahan Keluarga.....	76
Tabel 8 Pencapaian Pendidikan.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Garis besar Bab 2.....	3
Gambar 3. 1 Garis besar Bab 3.....	14
Gambar 4. 1 Garis besar Bab 4.....	25
Gambar 4. 2 Hubungan Model 1	27
Gambar 4. 3 Hubungan Model 2	29
Gambar 4. 4 Hubungan Model 3	30
Gambar 5. 1 Garis besar Bab 5.....	39
Gambar 5. 2 Hasil hubungan Model 1.....	41
Gambar 5. 3 Hasil hubungan Model 2.....	42
Gambar 5. 4 Hasil hubungan Model 3.....	44
Gambar 6. 1 Garis besar Bab 6.....	47
Gambar 6. 2 Hasil representasi model.....	48

BAB 1 PENDAHULUAN

Teori sosiologi klasik anomie (Merton, 1938) dan pengembangan selanjutnya, kelembagaan anomie teori (Messner, et al., 2007), menawarkan bagi peneliti wawasan dan kerangka kerja yang ketat untuk dasar-dasar teoritis perilaku menyimpang di masyarakat dan pada kelanjutannya bagi institusi terstruktur seperti perusahaan. Teori anomie kelembagaan menyediakan nilai-nilai budaya dan kelembagaan tertentu yang diperhitungkan ketika berhadapan dengan tindakan yang tidak sesuai, menyimpang, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori anomie kelembagaan sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya untuk memprediksi perilaku menyimpang dengan lembaga-lembaga sosial dan nilai-nilai budaya untuk hal-hal sosial seperti tingkat pembunuhan (Messner, et al., 1997) dan tingkat kejahatan (Schoepfer, et al., 2006). Dengan demikian, efek merugikan dari propagasi egoistik dalam teori anomie kelembagaan menyediakan prinsip-prinsip yang mengakar untuk lebih memperluas dan menyelidiki perilaku perusahaan ke dalam berbagai bentuk bidang penalaran etis (Cullen, et al., 2004) seperti tindakan menyimpang dalam praktek-praktek persaingan antara perusahaan-perusahaan. Kerusakan norma sosial menjadi umum ketika nilai budaya yang menempatkan penekanan utama pada materialisme, berupa uang dan ekonomi, demi keberlangsungan perusahaan (Merton, 1938).

Sejak karya Messner dan Rosenfeld, kerangka tersebut pertama kali diterapkan di dunia manajemen (Cullen, et al., 2004) dalam upaya untuk memahami penyimpangan yang terjadi di berbagai perusahaan di dunia. Karya mereka menyarankan pentingnya perilaku etis para manajer yang harus mencakup budaya nasional dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sarana untuk menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tidak saja pada permasalahan etika etika tetapi juga pada fenomena manajemen lainnya.

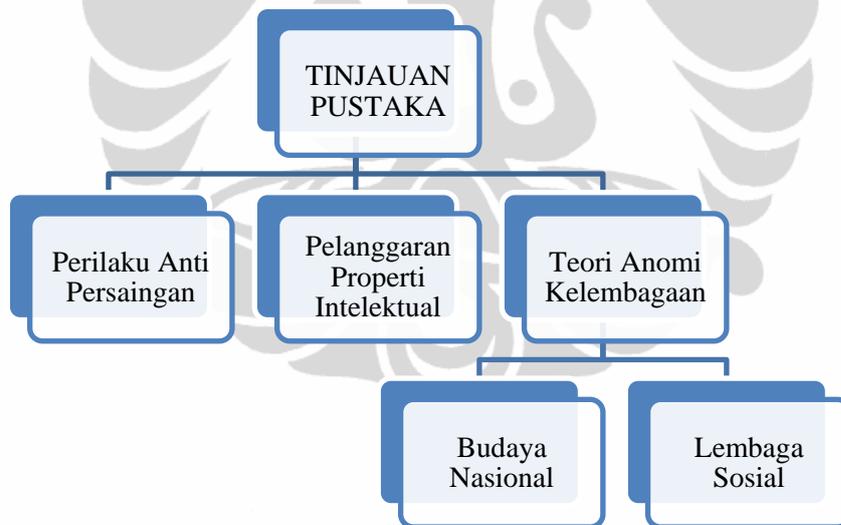
Kompetisi mendorong ekonomi (Porter, 1998). Berbagai negara di seluruh dunia yang dahulunya untuk mengandalkan lembaga-lembaga nasional konvensional

banyak yang bergegas untuk menginduksi persaingan di pasar mereka. Kompetisi adalah salah satu alasan yang paling signifikan mengapa suatu bangsa dapat dianggap sebagai sebuah keberhasilan ekonomi. Ketika suatu perusahaan dominan menyalahgunakan pengaruhnya terhadap pasar untuk menghalangi persaingan, melalui perilaku anti persaingan terselubung yang "menyimpang", system ekonomi akan menderita. Keberhasilan suatu usaha kecil, yang merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi (Golodner, 2001), sangat tergantung pada kondisi umum dan kesehatan ekonomi. Dengan demikian, Golodner menetapkan bahwa perilaku anti persaingan melukai ekonomi serta menyakiti usaha kecil.

Sebuah konteks yang menarik dari perilaku anti persaingan juga terjadi dalam bidang kekayaan intelektual, yang saat ini merupakan topik utama dari banyak berita. Hal ini berguna untuk memikirkan hukum hak kekayaan intelektual baik sebagai sistem hak milik yang mempromosikan produksi dari informasi berharga dan sebagai suatu sistem peraturan yang juga secara tidak sengaja mempromosikan perilaku menyimpang (Meurer, 2003). Sebagai contoh bagaimana perilaku yang tidak sesuai bisa muncul akibat pelanggaran kekayaan intelektual, penciptaan dan distribusi informasi yang harusnya bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesejahteraan sayangnya digunakan oleh pemilik yang menyimpang untuk mendapatkan peluang oportunistik (Meurer, 2003). Pihak yang menyimpang tersebut seringkali bermaksud untuk menjadikan hak kekayaan intelektual mereka sebagai tiket bagi mereka ke meja pengadilan untuk menuntut pengguna lainnya demi mencapai keuntungan finansial. Dan pada suatu kasus menarik hukum *antitrust* juga dapat menjadi senjata bagi penuntut untuk mengekstrak penyelesaian yang bermaksud menyimpang (Baumol, et al., 1985). Penulis juga mengemukakan bahwa litigasi kekayaan intelektual digunakan untuk mengusir pesaing yang akan memasuki pasar, dimana hal tersebut juga dapat diterjemahkan ke dalam tindakan perilaku anti persaingan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini pengertian beberapa isu terbaru dan teori yang mencakup penelitian akan dijelaskan lebih rinci. Karena penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia melakukan perilaku yang tidak sesuai terhadap praktek anti persaingan, penelitian ini juga mencakup perilaku seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diakibatkan oleh persaingan yang dialami oleh suatu perusahaan. Perspektif mengenai kondisi kontekstual tentang bagaimana budaya nasional dan lembaga sosial dari suatu negara dimana perusahaan berada, dapat menempatkan suatu tekanan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perilaku umum. Garis besar dari bab ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Garis besar Bab 2

2.1 Perilaku Anti Persaingan

Suatu praktek atau perilaku anti persaingan dilihat sebagai suatu kegiatan komersial ilegal yang dilarang (Kotabe, et al., 1998). Untuk mengendalikan praktek-praktek tersebut, hukum *antitrust* diberlakukan. Hukum ini melarang perilaku anti persaingan dan praktek bisnis tidak adil dimana otoritas hukum

tersebut dapat mengatur larangan-larangan (Baumol, 2001) dan dapat memberi denda kepada perusahaan yang dinyatakan bersalah pada praktek anti persaingan (Gual, et al., 2007). Hukum *antitrust* bekerja sebagai sarana kebebasan ekonomi. Hukum ini secara khusus diasah untuk mendorong daya saing dalam pasar (O'Sullivan, et al., 2005) dan untuk melindungi usaha dan / atau konsumen dari praktek-praktek ilegal atau penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan dominan (Golodner, 2001). Penegakan hukum *antitrust* membantu melestarikan dua kebebasan bagi usaha kecil: kebebasan untuk terlibat dalam kewirausahaan, dan kebebasan untuk berinovasi (Golodner, 2001).

Telah diketahui bahwa sebagian besar praktek-praktek anti persaingan dapat memperkaya bagi mereka yang melakukannya, namun ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa praktek tersebut memiliki efek negatif terhadap perekonomian dan kepada konsumen. Kebanyakan analisis formal persaingan antara perusahaan berasumsi bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Namun ada kemungkinan bahwa fokus lain selain pada keuntungan perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk mengejar kegiatan lain yang merugikan pesaing (Sappington, et al., 2003). Peneliti tersebut juga menemukan bahwa seiring dengan kurangnya fokus perusahaan terhadap laba, dapat memberikan insentif yang kuat bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang merugikan pesaing. Perilaku anti persaingan merupakan suatu perhatian bagi para ekonom karena, jika terjadi, akan merugikan bagi kinerja institusi pasar dalam hal efisiensi sosial (Sherstyuk, 2008). Suatu studi menunjukkan bahwa meskipun langkah telah diberlakukan untuk melarang perilaku anti persaingan, tampak bahwa sebagian besar tindakan gagal untuk menggapai wawasan awal mengenai apakah perilaku tersangka benar-benar memiliki efek anti persaingan (Jallab, et al., 2006).

Keberadaan yang memberatkan persaingan karena perilaku anti persaingan merentang di berbagai bidang dan kasus. Dalam sebuah penelitian, perusahaan yang meraup keuntungan dari kinerja adalah mereka yang menawarkan produk dan jasa yang didukung dengan kekuatan penawaran yang kokoh, di mana pertumbuhan jangka panjang dan pencapaian kinerja merupakan visi utama

(Kotabe, et al., 1998). Yang menarik dari penelitian ini adalah implikasinya yang menyatakan bahwa meskipun perilaku anti persaingan dapat terjadi, hal tersebut dapat tidak memiliki dampak negatif pada bisnis operasi kinerja perusahaan. Suatu contoh dari perilaku ini adalah ketika tiga perusahaan di Jepang mengajukan proposal kepada *Japan Fair Trade Commission* yang meminta diberlakukannya kecurangan kolusif pada penawaran dan penetapan harga, yang dikenal di Jepang sebagai *Dango*. Hal tersebut diutarakan oleh kletiga perusahaan ini untuk dapat dipraktekkan secara legal dalam industri mereka karena bermanfaat untuk ekonomi Jepang (1994).

Studi lain menunjukkan bahwa perombakan perusahaan melalui akuisisi akan meningkatkan kemungkinan perilaku anti persaingan (Sidak, 2002). Pengakuisisian hasil mengakibatkan situasi di mana suatu pihak akuisisi tidak mendapatkan manfaat keuntungan finansial yang dikarenakan perubahan pengendali perusahaan. Integrasi vertikal bagi perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu juga dapat meningkatkan perilaku anti persaingan (Motta, 2004). Menurut Motta, ada sejumlah mekanisme yang mungkin dari perilaku anti persaingan yang dapat mengakibatkan persaingan menurun (Weir, 1993). Hal ini dapat terjadi ketika pihak yang berbeda di sepanjang rantai industri saling melengkapi satu sama lain untuk mengamankan tujuan organisasi mereka, terutama untuk keuntungan finansial. Namun, sebuah temuan yang berbeda menunjukkan bahwa siapa yang mungkin mengalami manfaat terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami akuisisi sebenarnya adalah para pesaing mereka (Fridolfsson, et al., 2005). Oleh karenanya, untuk perusahaan akuisisi dapat bertahan hidup, kenaikan suatu harga dari produk/jasa mereka dapat memicu pesaing untuk meningkatkan kinerja mereka yang pada ujungnya adalah kemungkinan bertahan hidup ataupun kesuksesan perusahaan pesaing.

Koordinasi antar perusahaan yang selaras secara vertikal dapat sangat bermanfaat bagi perekonomian, memperkuat efisiensi dan pertumbuhan karena dapat memicu inovasi (Baumol, 2001). Baumol juga menyebutkan bahwa koordinasi ini perlu juga diamati untuk memastikan bahwa suatu tindakan perusahaan tidak berubah kepada perilaku anti persaingan yang merugikan konsumen. Kerjasama antara

perusahaan, tidak terbatas pada jalinan kerjasama vertikal rantai suplai, untuk menurunkan hambatan perdagangan dalam memenangkan suatu lelang perlu pula diperhatikan untuk menjamin tidak adanya tindakan perilaku anti persaingan ketika perusahaan-perusahaan yang bekerjasama tersebut ternyata terlibat secara kolusif untuk membatasi kompetisi dalam lelang (Iimi, 2004). Hasilnya, menurut penulis, adalah erosi kesejahteraan sosial. Perubahan struktural dalam sebuah lembaga pasar, liberalisasi pasar, akan menjadi bahan pertimbangan ketika perusahaan berperilaku secara anti persaingan. Semakin sempit pasar yang telah diliberalisasi semakin besar kecenderungan untuk berperilaku secara anti persaingan (Cave, 2010). Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan bahwa interaksi multi-pasar perusahaan menciptakan risiko timbulnya perilaku anti persaingan.

Dalam dunia properti intelektual, anatara lain pelanggaran hak cipta atau paten, dapat memicu praktek anti persaingan yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma persaingan. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan hak cipta dan paten. Penyalahgunaan hak cipta dapat menjadi senjata makan tuan terhadap suatu kasus pelanggaran hak cipta. Dasar untuk ini terletak pada bahwa pemegang hak cipta memiliki hak ciptanya dan menyalahgunakannya, sehingga tidak berhak atas perlindungan dari pelanggaran hak cipta pekerjaannya (Greguras, 1990). Hal lain yang mirip dengan konteks ini adalah penyalahgunaan paten. Penyalahgunaan paten memberikan pembelaan yang kuat yang dapat dimanfaatkan dalam litigasi paten ketika terdakwa telah dituduh melanggar paten pengadu. Kedua contoh penyalahgunaan diatas tersebut adalah beberapa perilaku yang dilakukan oleh pihak tertentu sebagai landasan suatu anti persaingan yang pada akhirnya dapat membawa kerugian bagi perekonomian suatu bangsa dan degradasi norma-norma sosial. Bagian berikut menjelaskan lebih lanjut tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual.

2.2 Pelanggaran Properti Intelektual

Kekayaan intelektual adalah suatu istilah yang mengacu pada sejumlah jenis kreasi berbeda dari suatu pikiran dimana hak eksklusifnya diakui sesuai dengan

bidang hukum yang berlaku (Raysman, et al., 1998). Jenis-jenis hak kekayaan intelektual antara lain termasuk hak cipta, merek dagang, serta paten. Pengakuan hak properti intelektual dapat dilacak pada awal abad kelima belas ketika saat itu di kota Venesia, Italia, telah memberikan perlindungan bagi seorang penemu untuk paten pertama di dunia (Mandich, 1948). Sebuah hukum kekayaan intelektual mengatur penciptaan serta distribusi informasinya dan informasi produknya. Hukum kekayaan intelektual penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Kanwar, et al., 2001) karena perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki efek positif yang kuat pada kemajuan teknologi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. "Jika kekayaan intelektual diinginkan karena mendorong inovasi, mereka beralasan, maka lebih banyak akan lebih baik. Landasan ini adalah bahwa pencipta tidak akan memiliki insentif yang cukup untuk mencipta kecuali mereka secara hukum berhak untuk memiliki nilai sosial utuh terhadap inovasi mereka" (Lemley, 2005).

Salah satu dari banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh situasi anti persaingan adalah ketika perusahaan sering menggunakan suatu litigasi kekayaan intelektual untuk mengecualikan saingan mereka dari pasar (Myers, 1992). Menurut Myers, perusahaan dengan paten yang luas dapat mengecualikan saingan mereka masuk dan mengecualikan mereka untuk beroperasi di pasar yang dilindungi oleh patennya. Lebih umumnya, perusahaan dapat menggunakan hak kekayaan intelektualnya untuk mengecualikan saingan dari suatu penggunaan, fitur produk, dan desain tertentu.

Litigasi eksklusif dapat menjadi cara yang diinginkan untuk mengamankan perusahaan inovatif (Rivette, et al., 2000), sehingga istilah "anti-persaingan" diperuntukkan untuk tuntutan hukum yang berusaha mengecualikan pihak lain yang tidak diinginkan (Posner, 1982). Dalam sebuah sistem perlindungan hak properti intelektual yang ideal, akan menjadi tidak mungkin untuk melakukan gugatan properti intelektual anti persaingan karena hal tersebut akan menjadi tidak kredibel. Sayangnya pada kenyataannya adalah tuntutan hukum anti persaingan yang mungkin terjadi karena penggugat tidak layak menerima dugaan yang valid atau setidaknya terhadap beberapa hak atas kekayaan intelektual (Meurer, 2003).

Tuntutan anti persaingan atas hak kekayaan intelektual dapat mencapai hasil yang diinginkan dari penuntut melalui dua mekanisme yang berbeda (Posner, 1982). Pertama, beberapa terdakwa menyelesaikannya dengan jaminan karena mereka takut hak kekayaan intelektual penggugat akan ditafsirkan terlalu luas, atau karena mereka tidak memiliki informasi yang tepat dan valid untuk membuktikan penggugat bersalah. Kedua, terdakwa lain mungkin yakin penggugat akan kehilangan gugatan tapi masih saja tetap menyelesaikan kasus dengan jaminan hanya untuk menghindari tingginya biaya litigasi. Selanjutnya, pemilik menyimpang tersebut mungkin berhasil menghalangi pesaing lain untuk menggunakan kekayaan intelektualnya karena ancaman gugatan (Myers, 1992). Meskipun ada contoh yang menunjukkan litigasi yang mungkin dibawa ke pengadilan, mayoritas tuntutan hukum kekayaan intelektual menyelesaikannya sebelum sidang (Lemley, 2001). Penyelesaian dengan jaminan tersebut biasanya dilakukan antara penggugat dan tergugat, yang juga seringkali merupakan pesaing. Mengingat pernyataan sebelumnya, penyelesaian jaminan di atas tersebut akan menjadi ilegal untuk dilakukan ketika paten itu valid dan dilanggar.

Litigasi anti persaingan properti intelektual yang sukses belum pernah didokumentasikan dengan baik, tetapi ada satu kasus usaha pengecualian persaingan yang gagal (2001). Kasus Handgards, Inc terhadap Ethicon memberikan contoh dari suatu upaya gagal dimana penggugat berharap untuk mengelabui tergugat menuju ke suatu perjanjian penyelesaian kasus anti persaingan dengan jaminan (1983). Gugatan itu diselesaikan ketika Ethicon, pihak terdakwa, mengetahui bahwa paten yang dimaksud tidak sah karena ada penemu sebelumnya dan penggunaannya untuk kepentingan umum yang lebih dari satu tahun sebelum Handgards membawa patennya untuk digunakan sebagai gugatan hukum.

Selain contoh-contoh litigasi paten, klaim *trade dress*, yang berhubungan dengan desain produk dan konfigurasi, menimbulkan ancaman serius predasi tindakan menyimpang (McCarthy, 1996). *Trade dress* termasuk pada kemasan, serta desain produk dan konfigurasi yang dilindungi oleh hukum merek dagang. Bukti litigasi anti persaingan *trade dress* didorong oleh keinginan untuk memaksakan litigasi

yang tentunya berdampak negatif pada kondisi keuangan suatu perusahaan dan dapat pula secara umum mencegah persaingan sehat (2002). Ilustrasi tuntutan hukum diatas sangat mengganggu karena hal tersebut dapat membuat kesulitan secara finansial karena dapat menunda perusahaan untuk masuk ke dalam pasar atau dapat pula mendorong perusahaan untuk meninggalkan pasarnya yang pada kenyataan terselubung telah diduduki oleh penguasa dominan pasar (2001).

Terlebih lagi, pelanggaran hak kekayaan intelektual merupakan hambatan besar bagi perusahaan-perusahaan baru (Bone, 1998), terutama perusahaan-perusahaan di industri teknologi tinggi (Bolton, et al., 2000). Menurut para penulis ini, dalam industri ini, investor yang tidak memiliki informasi pasar yang memadai yang memutuskan untuk menuangkan kemampuannya akan menjadi pihak yang paling terdampak. Perusahaan lain yang bersifat predatorial dapat menyabotase hubungan mangsanya dengan investornya dengan menyebabkan permasalahan arus kas.

Perlindungan kekayaan properti intelektual yang lebih baik dan terlengkapi dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif (Grossmann, et al., 2008). Namun penelitiannya juga menunjukkan bahwa penegakkan tindakan perlindungan bahkan dapat memicu perilaku anti persaingan pada perusahaan-perusahaan dengan dalil pertahanan di dalam pasar (Grossmann, et al., 2008). Kedua situasi tersebut yang tampaknya bertentangan, menurut Grossmann dan Steger, ternyata bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

2.3 Teori Anomi Kelembagaan

Akar teoritis dari teori anomie kelembagaan dikembangkan dari teori sosiologi terkemuka anomie (Durkheim, 1997). Studi yang dilakukan oleh Durkheim menghasilkan landasan anomie berupa perusakan atau peninggalan secara sengaja terhadap norma sosial, dimana modernisasi dan industrialisasi memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai kelembagaan dan budaya dari suatu masyarakat, yang pada gilirannya akan mengakibatkan pelanggaran *hypernorm* atau penyimpangan beruntun (Durkheim, 2005). Durkheim meminjam istilah anomie

dari seorang filsuf Perancis bernama Jean-Marie Guyau, di mana Guyau mengamati penyimpangan dalam masyarakat Perancis setelah terjadinya modernisasi Perancis yang signifikan karena Revolusi Industri. “Anomi” berasal dari kata Yunani “*anomia*”, dimana Orru berpendapat sebagai ketidakberadaan-norma atau “keberadaan tanpa hukum” (Orru, 1987) yang diakibatkan oleh ditinggalkannya nilai-nilai yang berlaku bagi umum.

Kemudian seorang sosiolog Amerika, Robert K. Merton, menemukan bahwa struktur kelembagaan masyarakat dan nilai-nilai budayanya juga rentan terhadap penyimpangan (Merton, 1968). Tetapi bagi Merton hal tersebut adalah suatu pragmatisme untuk mencapai akhir yang diinginkan dimana dengan mengambil studi kasus Impian Amerika (*American Dream*) yang berpendapat keberhasilan materialistis dan ekonomi merupakan sesuatu yang lazim. Keinginan dalam mencapai tujuan, dengan tindakan baik sah atau tidak sah, yang berkaitan dengan materialisme dan ekonomi dimana tindakan tersebut mengesampingkan kode etis tentang bagaimana untuk mencapai tujuannya, merupakan titik fokus Merton. Temuan Merton berpendapat bahwa stratifikasi sosial atau sistem kelembagaan yang mencegah seseorang dari suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang ternyata dianggap umum dan merupakan keharusan dalam budaya orang tersebut, akan meningkatkan kemungkinan penggunaan sarana menyimpang. Dan peneliti lain menyiratkan, anomie adalah suatu kondisi sosial-struktural (Menard, 1995). Selanjutnya, Merton mendefinisikan anomie sebagai “suatu kondisi tanpa norma dan ketidakseimbangan sosial dimana aturan yang mengatur perilaku telah kehilangan kemampuan dan daya tariknya” (Merton, 1964).

Teori anomie kelembagaan merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori anomie. Menurut Messner dan Rosenfeld (Messner, et al., 2007) harus ada penekanan lebih pada nilai-nilai kelembagaan anomie. Merton menekankan pada budaya yang menghasilkan tekanan anomie terhadap suatu individu dengan memperhatikan, antara lain, perilaku individualistis, orientasi prestasi, dan universalisme. Namun teori anomie kelembagaan memperluas konsep teori anomie dengan mempertimbangkan lembaga-lembaga sosial seperti ekonomi,

pemerintahan sistem, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan (Messner, et al., 2007). Teori anomie kelembagaan dikembangkan untuk menyertakan tingkat perilaku menyimpang karena pengaruh dari lembaga-lembaga masyarakat dan nilai-nilai budayanya. Dan juga, peran sistem stratifikasi sosial dibatasi dalam teori anomie kelembagaan. Teori kelembagaan anomie dimaksudkan untuk menjelaskan variasi tingkat makro, seperti negara, dalam kasus pidana.

Dengan demikian, teori anomie kelembagaan mencakup gagasan bahwa penalaran rasional dan etis, baik secara kelembagaan dan budaya, dikuasai oleh penalaran yang lebih bersifat egois. Propagasi ini kemudian memiliki efek negatif terhadap norma dan kontrol sosial tradisional yang didasarkan pada hubungan keluarga dan komunal. Keadaan tanpa norma dapat meresap pada struktur sosial dan struktur kelembagaan perusahaan, memberi tekanan lebih bagi perusahaan untuk berperilaku dengan cara yang tidak sesuai untuk mencapai tujuan organisasi mereka. Bagi suatu perusahaan, cara yang sah mungkin terbatas bagi mereka yang merasa tertekan untuk menggapai tujuan organisasi mereka (Martin, et al., 2009). Jika kondisinya cukup parah, pada akhirnya keberadaan perusahaan di suatu masyarakat akan berubah menjadi suatu masyarakat yang tidak memiliki nilai moral sama sekali (Rosenfeld, et al., 1997).

2.3.1 Budaya Nasional

Budaya nasional didefinisikan sebagai “pikiran pemrograman kolektif yang membedakan suatu kelompok dari kelompok manusia lainnya” (Hofstede, 1984) dan budaya nasional menyediakan pedoman yang diperlukan bagi masyarakat terhadap apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima yang dikaitkan dengan nilai, keyakinan, dan tindakan (Schwartz, 1992). Sebuah kebudayaan nasional, sebagai salah satu struktur sosial, memberikan tekanan yang pasti kepada masyarakat untuk terlibat dalam tindakan nonkonformis tertentu. Fase-fase tertentu dari struktur sosial menghasilkan suatu keadaan dimana pelanggaran kode sosial merupakan respon yang dianggap normal (Merton, 1938). Nilai-nilai budaya yang dipaksakan kepada masyarakat bisa memberi berbagai semangat perilaku yang tidak sesuai, seperti ketika perusahaan menemukan

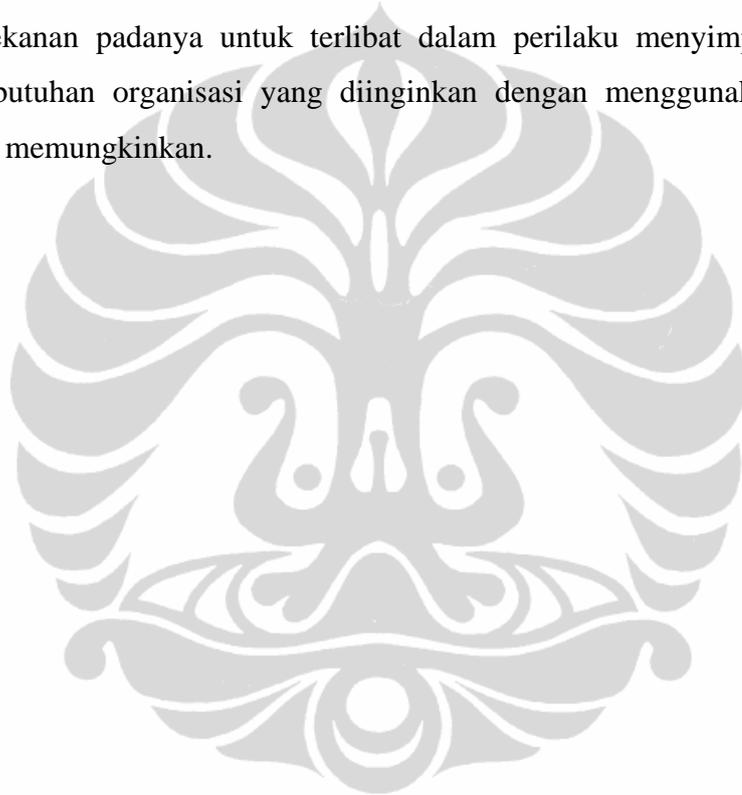
kesulitan untuk bertahan hidup karena pelanggaran kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, ada tekanan bagi pihak tersebut untuk mengesampingkan perilaku yang sesuai dengan norma. Bagi pihak yang memperoleh keuntungan diri melalui perilaku yang tidak sesuai untuk mencapai tujuan egois mereka tersebut, apakah itu untuk bertahan hidup, laba, atau produktivitas, dinyatakan sebagai anomie.

Teori anomie kelembagaan menggali budaya nasional sebagai kekuatan yang memberi tekanan bagi suatu pihak untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai: antara lain individualisme, prestasi, dan universalisme (Messner, et al., 2007). Ketiga nilai budaya tersebut, sebagaimana penulis mengungkapkannya, menciptakan tekanan anomie untuk menggapai tujuan akhir dengan cara yang tidak sesuai. Menurut Messner dan Rosenfeld, nilai-nilai ini mendorong memburuknya hubungan sosial tradisional, pelemahan dari aturan-aturan sosial tradisional, dan penekanan pada pembenaran pencapaian tujuan yang egoistik tanpa kepedulian terhadap pihak lain. Dalam hal ini, tiga nilai budaya dari suatu masyarakat tersebut dapat mempromosikan keputusan yang egois dan tidak etis bagi perusahaan sehingga timbulnya tindakan praktek anti persaingan.

2.3.2 Lembaga Sosial

Sisi lain yang melakukan tekanan bagi suatu pihak untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai adalah lembaga sosial. Menurut Messner dan Rosenfeld, teori anomie dikembangkan oleh Merton perlu memiliki landasan lebih lanjut mengenai lembaga sosial di mana masyarakat tersebut berada. Lembaga ini merupakan dasar dari analisis tingkat makro di mana lembaga-lembaga sosial merupakan blok-blok pembangunan masyarakat (Messner, et al., 2007). Menurut peneliti lain, sebuah institusi adalah "suatu set dari norma-norma yang relatif stabil terhadap nilai-nilai status dan peran, serta kelompok dan organisasi" yang mengatur perilaku para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam masyarakat (Gelles, et al., 1995) dalam "aturan main masyarakat" (North, 1990). North menyatakan bahwa peran utama dari lembaga sosial adalah untuk membentuk struktur yang diterima bagi interaksi manusia dalam menyediakan beberapa jenis pertukaran hasil yang diinginkan (North, 1989).

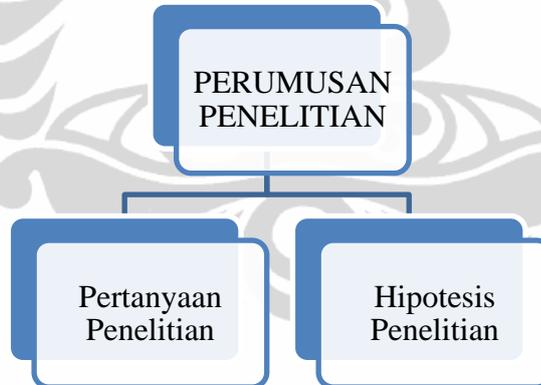
Messner dan Rosenfeld menyebutkan lembaga-lembaga sosial yang melakukan tekanan adalah perekonomian, sistem politik, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan prestasi. Lembaga-lembaga sosial ini saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain di mana hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik, koordinasi dan kerja sama harus ada di antara lembaga-lembaga tersebut. Tekanan anomie yang pada akhirnya dapat berujung sebagai situasi “tanpa norma”, bisa meresap ke dalam struktur sosial masyarakat (Messner, et al., 2007). Bagi suatu perusahaan, kondisi di negara tersebut telah melakukan tekanan padanya untuk terlibat dalam perilaku menyimpang demi mencapai kebutuhan organisasi yang diinginkan dengan menggunakan semua perilaku yang memungkinkan.



BAB 3

PERUMUSAN PENELITIAN

Dalam bab ini, formulasi pertanyaan penelitian, hipotesis, dan model penelitian akan dieksplorasi. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan, namun hipotesis dikembangkan dalam konteks pertanyaan penelitian akan menjadi delapan hipotesis. Kedelapan hipotesis dikembangkan dari preposisi teori dasar anomie kelembagaan yang pertama kali dikembangkan oleh Messner dan Rosenfeld. Dalam teori ini, ada ukuran kebudayaan nasional serta lembaga-lembaga sosial dari setiap negara, tergantung di mana perusahaannya beroperasi. Dan di bagian terakhir bab ini, model penelitian yang digunakan dijabarkan. Model yang digunakan menggunakan pendekatan pemodelan bertingkat linear hirarkis.



Gambar 3. 1 Garis besar Bab 3

3.1 Pertanyaan Penelitian

Seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam tinjauan literatur, ada ulasan tentang bagaimana sifat perilaku anti persaingan timbul yang berasal dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sebagian besar penelitian yang dilakukan sampai hari ini difokuskan pada konteks persaingan mengenai bagaimana perlindungan kekayaan intelektual dapat meningkatkan daya saing suatu negara,

inovasi, dan dengan demikian ekonominya. Yang terbatas adalah dokumentasi penelitian mengenai masalah-masalah perilaku anti persaingan di seluruh dunia dalam hal bagaimana teori anomie kelembagaan, budaya nasional serta lembaga sosial, mempengaruhi perilaku anti persaingan karena pelanggaran hak kekayaan intelektual yang meliputi beberapa tingkat analisis budaya nasional dan kelembagaan sosial. Perspektif khusus ini memberikan pendekatan yang kuat untuk mempelajari perilaku menyimpang perusahaan di seluruh dunia. Tekanan anomie akan diselidiki kepada perusahaan terhadap pengaruh budaya bangsa dan kelembagaan sosialnya. Dari teori anomie kelembagaan ini, pertanyaan penelitian ini menjadi:

Dalam pengertian apa budaya nasional dan lembaga social dari teori anomie kelembagaan dapat menjelaskan hubungan yang sesuai bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perilaku anti persaingan?

Dalam pengertian apa budaya nasional dan lembaga social dari teori anomie kelembagaan dapat menjelaskan hubungan yang sesuai bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual?

Pertanyaan penelitian pertama menguji teori anomie kelembagaan sebagai prediktor perilaku anti persaingan menyimpang. Pada pertanyaan penelitian kedua, merupakan pengetahuan khusus bahwa salah satu kontribusi utama untuk kemajuan teori adalah sifat interaksional hipotesis (Chamlin, et al., 1995). Premis dari teori anomie kelembagaan menunjukkan bahwa ada hubungan interaktif antara lembaga-lembaga sosial dan nilai-nilai budaya (Savolainen, 2000). Hal ini berdasarkan asumsi inti dari teori anomie kelembagaan dimana tingkat kejahatan dalam masyarakat tergantung pada keseimbangan antara unsur budaya dan struktur sosial (Messner, et al., 2007). Dan juga, Messner dan Rosenfeld lebih lanjut menetapkan bahwa kekuatan relatif antara lembaga adalah aspek yang paling terlihat dari struktur sosial. Sebelumnya studi tentang efek interaksi yang menarik ini telah dipelajari dan memberikan wawasan baru dan pendekatan baru

dalam memahami lebih dalam perilaku menyimpang yang ditetapkan oleh teori anomie kelembagaan (Martin, et al., 2007). Mengikuti pendekatan Savolainen, penelitian ini akan melibatkan estimasi teori anomie kelembagaan dari pengaruh moderasi hubungan konteks budaya tingkat-nasional dan konteks kelembagaan antara perilaku anti persaingan dan pelanggaran kekayaan intelektual.

3.2 Hipotesis Penelitian

Pelanggaran kekayaan intelektual, antara lain seperti hak cipta atau paten, dapat memicu praktek anti persaingan yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma tradisional yang ditegakkan oleh hukum kompetisi. Banyak bukti yang menjabarkan kasus-kasus tersebut dimana perusahaan terlibat untuk mengecualikan saingan mereka untuk masuk dan beroperasi di pasar mereka yang dilindungi oleh paten sang pihak yang mempraktekkan anti persaingan (Myers, 1992). Situasi tersebut muncul dari kemungkinan tuntutan hukum anti persaingan karena penggugat tidak layak menerima dugaan yang valid atau setidaknya beberapa hak atas kekayaan intelektualnya (Meurer, 2003). Keinginan untuk memaksakan litigasi karena pelanggaran kekayaan intelektual memiliki dampak negatif pada keuangan perusahaan dan menghambat persaingan sebagai bagian dampak yang lebih luas (2002), di mana perusahaan tersebut dapat menimbulkan indikasi monopoli pasar yang tentunya merupakan praktek anti persaingan. Adapun untuk penelitian ini, pelanggaran kekayaan intelektual ditetapkan sebagai efek utama hipotesis tingkat-perusahaan

Hipotesis 1:

Pelanggaran kekayaan intelektual positif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

Dalam lensa nilai budaya, orientasi individualisme mempromosikan “pelepasan” dari masyarakat kolektif, sehingga memungkinkan bagi pihak tersebut untuk memiliki ikatan lemah terhadap aturan social yang berlaku. Selain itu, orientasi individualisme menempatkan kepentingan yang rendah pada tujuan kolektif dan cenderung mengarah pada pembuatan keputusan yang lebih egoistik

(Trompenaars, et al., 1998). Dua penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya individualistic yang kuat, perhitungan pengambilan keputusan yang dominan akan didasarkan pada tujuan akhir organisasi (Robertson, et al., 1999) (Jackson, 2001).

Budaya individualis adalah suatu masyarakat di mana individu-individu tertentu yang condong untuk menitikberatkan kepentingan mereka sendiri (Hofstede, 1984). Jenis nilai budaya ini menempatkan penekanan lebih pada perilaku perusahaan yang mengejar tujuan organisasinya secara egoistik, tanpa memperhatikan pada konsekuensi etis yang mungkin berdampak (Cullen, et al., 2004). Pemahaman ini berbagi pandangan dengan teori anomie kelembagaan, di mana nilai-nilai budaya individualistik mendorong perusahaan untuk membuat keputusan yang berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan dengan pertimbangan rendah untuk etika atau hukum yang berlaku (Messner, et al., 2007). Dengan demikian, nilai-nilai otonomi, kemandirian, dan daya saing muncul ke permukaan sebagai perhatian utama perusahaan (Hofstede, 2001). Dan dalam konteks teori anomie kelembagaan, persaingan dengan tekanan pengaruh individualistis akan mendorong perusahaan untuk meninggalkan norma-norma tradisional yang berlaku demi mengejar tujuan perusahaan (Messner, et al., 2007), bahkan dengan mengorbankan hubungan sosial dan koneksi (Khatri, et al., 2006). Dan untuk penelitian ini, orientasi individualisme ditunjuk sebagai hipotesis efek utama tingkat-nasional (bagian dari budaya nasional), serta hipotesis efek moderasi tingkat-nasional untuk perilaku anti persaingan.

Hipotesis 2a:

Orientasi individualisme tingkat-nasional positif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

Hipotesis 2b:

Orientasi individualisme tingkat-nasional memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual.

Pencapaian mengacu pada penilaian nilai pribadi atas dasar hasil dari usahanya (Trompenaars, et al., 1998). Dalam masyarakat yang berorientasi pada pencapaian, maka pencapaian menjadi ukuran utama untuk suatu kriteria sukses (Husted, 1999). Orientasi pencapaian di atas semua pertimbangan lain demi menang dapat berarti kode etik akan memungkinkan untuk diabaikan (Messner, et al., 2007), dan memiliki potensi menjadi sebuah paradigma perusahaan. Fokus pada pencapaian pada tujuan tersebut bisa menciptakan harapan yang terus meningkat (Zahra, et al., 2005) dan berkurangnya pertimbangan untuk menggunakan sarana yang memadai untuk mencapai mereka (Messner, et al., 2007). Seperti apa yang Messner dan Rosenfeld nyatakan, "bukan bagaimana Anda memainkan permainan: tetapi apakah Anda menang atau kalah". Fokus orientasi pencapaian tersebut mendorong obsesi dalam mengejar tujuan yang lebih kompetitif dan materialistis (Passas, 2000). Studi lain mengutarakan temuannya bahwa dalam budaya dengan persaingan yang ketat, baik untuk status, prestise, dan kekayaan materialistis, "perlakuan khusus" mungkin digunakan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu (Khatri, et al., 2006). Dan untuk penelitian ini, orientasi pencapaian ditunjuk sebagai efek hipotesis utama tingkat-nasional (bagian dari budaya nasional), serta efek hipotesis moderasi tingkat-nasional untuk perilaku anti persaingan.

Hipotesis 3a:

Orientasi pencapaian prestasi tingkat-nasional positif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

Hipotesis 3b:

Orientasi pencapaian tingkat-nasional memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual.

Orientasi universalisme mendorong kesetaraan kesempatan di mana hal tersebut menciptakan harapan bahwa semua orang akan dianggap pada kriteria yang sama, bukan pada hubungan partikularistik (Trompenaars, et al., 1998). Universalisme mengacu pada gagasan bahwa peluang untuk sukses terbuka untuk semua orang.

Kriteria ini juga berbagi makna dengan egalitarianisme. Gagasan ini menyatakan bahwa penilaian harus didasarkan pada kemampuan, bukan kriteria partikularistik ras, kebangsaan, kelas sosial, afiliasi institusional, atau asal-usul (Braxton, 1993). Orientasi ini memungkinkan entitas untuk berusaha menuju tujuan mereka (Blau, et al., 1978). Namun demikian harapan seperti egalitarianisme juga mempromosikan masyarakat dengan gagasan untuk mencapai tujuan mereka secara egois. Dibandingkan dengan masyarakat yang berorientasi partikularistik, perilaku istimewa memungkinkan untuk memiliki efek negatif pada ambisi entitas. Dengan menempatkan penekanan pada ambisi dalam konteks masyarakat yang berorientasi universal, lebih mungkin bagi mereka untuk terlibat secara orientasi diri yang lebih egoistik untuk mencapai tujuan mereka (Messner, et al., 2007). Orientasi ini menempatkan perhatian untuk perilaku menyimpang karena kesempatan yang sama berarti peluang yang sama untuk suatu keberhasilan maupun kegagalan. Situasi tertentu tersebut, keberhasilan maupun kegagalan, dapat mengarah ke perspektif egois dan tekanan yang meningkat untuk menggunakan segala cara yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan untuk penelitian ini, egalitarianisme orientasi ditunjuk sebagai hipotesis efek utama tingkat-nasional (bagian dari budaya nasional), serta hipotesis efek moderasi tingkat-nasional untuk perilaku anti persaingan.

Hipotesis 4a:

Orientasi egalitarianisme tingkat-nasional positif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

Hipotesis 4b:

Orientasi egalitarianisme tingkat nasional memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual.

Perekonomian suatu negara merupakan institusi sosial (Turner, 1997) yang terdiri dari kegiatan yang diselenggarakan di sekitar produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar eksistensi manusia (Messner, et al., 2007). Ketika lembaga ekonomi memainkan pengaruh besar di negara itu, maka

negara akan mengalami efek yang melemahkan kontrol normatif tradisional (Rosenfeld, et al., 1997). Studi lain juga menemukan bahwa tingkat modernisasi agresif suatu negara merupakan tanda bahwa dominasi dari sistem ekonomi (Esping-Andersen, 1990).

Teori anomie kelembagaan mengedepankan gagasan bahwa ketika peran ekonomi individu mengatur peran yang besar dalam masyarakat, logikanya akan condong pada basis perhitungan dan utilitarian pasar yang dapat menyebabkan kemerosotan aturan sosial. Maka, pihak tersebut akan mencari tujuan mereka secara lebih egoistik melalui cara-cara sosial yang tidak sesuai (Messner, et al., 2007). Modernisasi juga bertindak sebagai tekanan bagi manajer perusahaan untuk membenarkan perilaku menyimpang dalam mengejar tujuan organisasi yang egois dalam menghadapi persaingan (Passas, 2000). Industrialisasi juga mendorong penekanan pada keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan ekonomi, yang semuanya merupakan tujuan egoistik (Inglehart, 1997). Dan untuk penelitian ini, pembangunan ekonomi ditunjuk sebagai hipotesis efek utama tingkat-nasional (bagian dari lembaga sosial), serta hipotesis efek moderasi tingkat-nasional untuk perilaku anti persaingan.

Hipotesis 5a:

Perkembangan ekonomi tingkat-nasional positif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

Hipotesis 5b:

Pembangunan ekonomi suatu negara memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual.

Sistem politik memobilisasi dan mendistribusikan kekuatan untuk mencapai tujuan kolektif (Messner, et al., 2007), dan satu tujuan kolektif khusus yang penting adalah perlindungan keamanan publik. Institusi politik bertanggung jawab untuk "melindungi anggota masyarakat dari invasi asing, mengendalikan kejahatan dan gangguan dalam, dan menyediakan saluran untuk menyelesaikan

konflik yang berkepentingan" (Gelles, et al., 1995). Promosi pemerintahan dari berbagai sistem ekonomi juga memiliki pengaruh pada perilaku menyimpang tingkat nasional (Messner, et al., 2007). Sebuah negara yang berorientasi kapitalis menandakan bahwa ekonomi yang didorong secara kompetitif pada pasar dan dimana pasar menyediakan umpan balik untuk merangsang upaya tersebut (Cullen, et al., 2004). Selanjutnya, sistem kapitalis suatu negara tercatat sebagai "sistem ekonomi pelayanan diri di mana setiap pihak akan bertanggung jawab untuk kepentingannya masing-masing" (Ralston, et al., 1997). Seperti apa yang teori anomie kelembagaan nyatakan, upaya tersebut yang memiliki kepentingan pribadi mereka sebagai fokus utama, dapat menyebabkan kontrol normatif sosial yang ditegakkan melemah dimana risiko perilaku menyimpang menjadi lebih besar.

Berlawanan dari sistem politik kapitalis, sistem politik sosialis memiliki intervensi pemerintah pada tingkat nasional. Pemerintah yang merangkul sistem ini menaruh perhatian lebih dalam mengatur kegiatan ekonomi seperti koordinasi, pertanggung-jawaban, dan redistribusi kekayaan ekonomi (Turner, 1997). Sesuai dengan teori anomie kelembagaan, kesejahteraan sosialisme menawarkan "jaring keamanan" yang melindungi rakyat dari perilaku predator pasar bebas (Messner, et al., 2007), sehingga pihak yang terlibat dapat menahan diri dari ketergantungan pada kekuatan pasar yang kompetitif (Savolainen, 2000). Negara-negara yang diatur dengan fokus pada sosialisme berusaha untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas daripada tujuan egosentris (Tsoukas, 1994). Tindakan seperti sosialisme kemudian akan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menggunakan sarana yang tidak sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan untuk penelitian ini, sistem politik sosialisme ditetapkan sebagai hipotesis efek utama tingkat-nasional (bagian dari lembaga sosial), serta hipotesis efek moderasi tingkat-nasional untuk perilaku anti persaingan.

Hipotesis 6a:

Sistem politik sosialisme tingkat-nasional negatif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

Hipotesis 6b:

Sistem politik sosialisme suatu negara memiliki moderasi negatif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual.

Keluarga yang stabil, yang merupakan suatu lembaga sosial tradisional, akan mengurangi sifat egosentris manusia yang dihasilkan dari masyarakat yang didominasi ekonomi (Chamlin, et al., 1995). Institusi keluarga termasuk mengasuh anak-anak dan sosialisasi anak-anak pada nilai-nilai, tujuan, dan keyakinan budaya (Messner, et al., 2007). Messner dan Rosenfeld menyatakan lebih lanjut bahwa fungsi utama dari suatu keluarga dalam masyarakat modern adalah untuk memberikan dukungan emosional bagi anggotanya, sehingga dapat menyediakan tempat perlindungan dari ketegangan dan tekanan yang dihasilkan pada domain lembaga lainnya. Unit keluarga kuat dapat melawan kekuatan-kekuatan yang mendorong individu mengadopsi perilaku yang tidak sesuai untuk mencapai tujuan mereka (Cullen, et al., 2004). Pada titik ekstrim pandangan lain, perpecahan perkawinan dan keluarga telah terbukti menciptakan gangguan sosial yang mengurangi kontrol sosial informal dan peningkatan tindakan menyimpang (Stack, et al., 1998). Penulis lainnya menunjukkan bahwa perilaku menyimpang berasal dari perpecahan keluarga karena tidak adanya tempat cinta, kasih sayang, dan dedikasi dari orang tua (Fagan, 1995). Penulis ini berpendapat bahwa dalam ketiadaan tempat seperti itu akan meningkatkan resiko anggota menjadi orang bermasalah. Orang yang mengalami perpecahan keluarga akan memiliki berbagai dampak pada perusahaan yang berafiliasi dengan mereka. Orang-orang ini cenderung membuat keputusan yang salah bagi perusahaan, sehingga perusahaan tidak berfungsi dengan baik (Dominian, 1984), dan akhirnya meningkatkan kemungkinan memanfaatkan tindakan menyimpang untuk mencapai tujuan organisasi (Messner, et al., 2007). Dan untuk penelitian ini, lembaga keluarga ditunjuk sebagai hipotesis efek utama tingkat-nasional (bagian dari lembaga sosial), serta hipotesis efek moderasi tingkat-nasional untuk perilaku anti persaingan.

Hipotesis 7a:

Perpecahan keluarga tingkat-nasional positif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

Hipotesis 7b:

Perpecahan keluarga suatu negara memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual.

Lembaga pendidikan memiliki fungsi yang mirip dengan lembaga keluarga. Pendidikan merupakan prediktor kuat dari perkembangan moral dimana peneliti mengajukan argumennya bahwa pendidikan membantu masyarakat untuk memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka dan masyarakat setempat (Rest, 1986), dan untuk lingkup masyarakat yang lebih luas lainnya (Rest, et al., 1991). Sekolah diberi tanggung jawab untuk memberikan standar budaya dasar untuk generasi baru masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan penyesuaian pribadi, memfasilitasi pengembangan potensi manusia, dan memajukan basis pengetahuan umum budaya (Messner, et al., 2007). Peneliti lain menemukan bukti bahwa sistem pendidikan mendorong visi masyarakat pasca-materialisme (Inglehart, 1997) di mana masyarakat akan menilai kualitas hidup dan ekspresi diri yang lebih dari tujuan materialistik yang berupa uang. Teori anomie kelembagaan mendalilkan bahwa dengan pencapaian pendidikan yang lebih baik dari masyarakat, akan mengempis kemauan orang-orang untuk berkomitmen pada perilaku yang tidak sesuai (Chamlin, et al., 1995). Dan untuk penelitian ini, lembaga pendidikan ditunjuk sebagai hipotesis efek utama tingkat-nasional (bagian dari lembaga sosial), serta hipotesis efek moderasi tingkat-nasional untuk perilaku anti persaingan.

Hipotesis 8a:

Pencapaian pendidikan tingkat-nasional negatif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan.

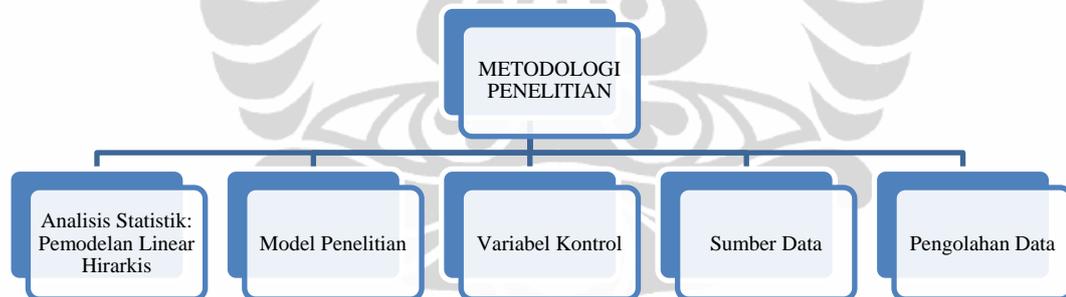
Hipotesis 8b:

Pencapaian pendidikan negara memiliki moderasi negatif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran properti intelektual.



BAB 4 METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan di penelitian ini. Dalam konteks ini, metode analisis statistik yang tepat akan dijelaskan dan mengapa digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis statistik akan secara singkat dijelaskan dalam menangani pengujian hipotesis yang diperlukan di penelitian ini. Data penelitian yang digunakan akan juga dijabarkan. Beberapa sumber data sekunder yang digunakan dari beberapa survei akan juga dijelaskan. Kemudian pula akan ada penjelasan pengolahan data. Bagian tersebut akan menunjukkan bagaimana data mentah pada awalnya akan disaring lalu dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk metode analisis statistik yang dipilih untuk penelitian ini. Garis besar dari bab ini adalah pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4. 1 Garis besar Bab 4

4.1 Analisis Statistik: Pemodelan Linear Hirarkis

Sebuah model bertingkat adalah model statistic yang diterapkan pada data yang telah dikumpulkan lebih dari satu tingkat untuk menjelaskan hubungan yang lebih dari satu tingkat (Luke, 2004). Seperti yang dinyatakan Luke, tujuan dari model bertingkat adalah untuk memprediksi nilai dari beberapa variabel dependen berdasarkan fungsi dari variabel prediktor yang lebih dari satu tingkat. Mengingat sifat dari data yang dipelajari dalam penelitian ini bersarang, berkerumun, dan

diukur dalam konteks lintas-tingkat, analisis pemodelan yang dikenal sebagai linier hirarki dengan estimasi *maximum-likelihood* telah terbukti sesuai untuk konteks bertingkat ini (Raudenbush, et al., 2011). Variabel dependen bersama dengan variabel kontrol yang telah disebutkan dalam penelitian ini berasal dari tingkat yang terpisah dari variabel independen. Level 1 mencakup ukuran tingkat-perusahaan sementara tingkat 2 mencakup ukuran tingkat-nasional. Teknik pemodelan hirarki linier dapat melakukan partisi varians antara variabel tingkat nasional dan tingkat perusahaan. Sangat penting bahwa varians dari setiap tingkat untuk dipertimbangkan sebagai penarikan kesimpulan yang valid dari pertanyaan penelitian; serta evaluasi dari efek perusahaan dan efek nasional yang terpisah pada perilaku anti persaingan (Hofmann, 1997).

Pendekatan pemodelan hirarki linier telah diusulkan kegunaannya untuk memperkirakan varians di dalam dan di antara kelompok secara bersamaan (Hofmann, 1997). Dengan pemodelan linear hirarkis, penelitian yang dilakukan pada pengestimasi parameter nasional dan perusahaan dapat menghindari distorsi ukuran sampel karena hal tersebut merupakan kejadian umum dengan metode *least square* biasa. Teknik konvensional statistik ini akan menimbulkan permasalahan dalam agregasi bias, kurangnya presisi dan permasalahan di tingkat analisis (Raudenbush, et al., 2002). Khususnya, metode *least square* biasa kemungkinan akan menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi kesalahan yang tidak berkorelasi (Luke, 2004). Karena keterbatasan dari ketidakmampuan metode tersebut, pemodelan linear hirarkis hadir sebagai metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan hubungan tingkat silang. Ide di balik pemodelan linear hirarkis adalah perhitungan estimasi parameter dan kesalahan standar dengan bobot tingkat nasional dengan reliabilitas ukuran sampel pada tingkat perusahaan-bagi variabel-variabel dependen dalam setiap kelompok tingkat-nasional. Dengan demikian, kesalahan standar tingkat-nasional akan mengendalikan deflasi yang terjadi pada metode *least-square* biasa.

Namun demikian, pemodelan linear hirarkis memiliki keterbatasan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah ketika dalam menerapkan teknik ini ia memerlukan ukuran sampel yang cukup besar untuk dapat memiliki kekuatan penjelasan yang

cukup (Snijders, et al., 2011). Tanpa jumlah yang tepat dari ukuran sampel, teknik ini akan kekurangan kekuatan untuk menyaring semua efek kecuali efek yang paling kuat, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan Tipe II.

4.2 Model Penelitian

Dikarenakan penelitian ini diasah terhadap budaya nasional kelembagaan dari teori anomie dan dari lembaga sosial yang memiliki dampak terhadap perilaku anti persaingan dari perusahaan yang dikarenakan pelanggaran kekayaan intelektual, dan juga sebagai pertanyaan hipotesis penelitian memerlukan beberapa usaha pada pemodelan tersebut, akan ada tiga model yang dieksplorasi dalam penelitian ini. Setiap model diasah dengan seberapa baik prediktor yang digunakan dalam masing-masing model dalam memprediksi perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh perusahaan. Notasi-notasi berikut menggambarkan model yang digunakan:

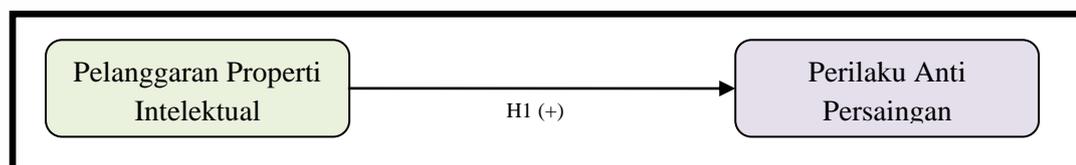
Model 1:

- Level 1 (tingkat-perusahaan):

$$\begin{aligned} & \text{ANTICOMPETITIVE} \\ & = \beta_0 + \beta_1(\text{VIOLATE}) + \beta_3(\text{FIRMSIZE}) \\ & + r \end{aligned} \quad (4.1)$$

- Level 2 (tingkat-nasional):

$$\beta_0 = \gamma_{00} + u_0 \quad (4.2)$$



Gambar 4. 2 Hubungan Model 1

Model pertama tersebut menggambarkan hubungan antara perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang diprediksi hanya oleh pelanggaran kekayaan intelektual mereka. Model ini menggunakan model linier hirarkis dengan metode *intercept-as-outcome* tanpa dimasukkannya efek moderasi dari teori anomie kelembagaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam model ini adalah ukuran perusahaan.

Model 2:

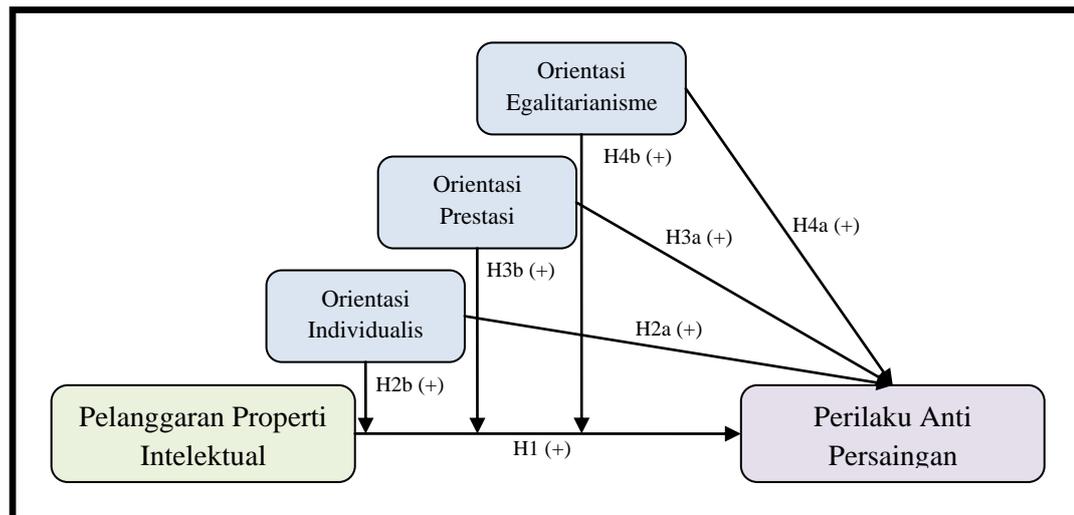
- Level 1 (tingkat-perusahaan):

$$\begin{aligned} \text{ANTICOMPETITIVE} \\ &= \beta_0 + \beta_1(\text{VIOLATE}) + \beta_3(\text{FIRMSIZE}) \\ &+ r \end{aligned} \quad (4.3)$$

- Level 2 (tingkat-nasional):

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \gamma_{00} + \gamma_{01}(\text{ACHIEVEMENT}) \\ &+ \gamma_{02}(\text{INDIVIDUALISM}) \\ &+ \gamma_{03}(\text{EGALITARIANISM}) + u_0 \end{aligned} \quad (4.4)$$

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \gamma_{10} + \gamma_{11}(\text{ACHIEVEMENT}) \\ &+ \gamma_{12}(\text{COLLECTIVISM}) \\ &+ \gamma_{13}(\text{EGALITARIANISM}) \end{aligned} \quad (4.5)$$



Gambar 4. 3 Hubungan Model 2

Model kedua menggambarkan hubungan antara perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang diakibatkan oleh pelanggaran kekayaan intelektual dengan prediktor budaya nasional (orientasi prestasi, orientasi individualis, dan orientasi egalitarianisme). Model ini menggunakan metode model linier hirarkis *intercept-as-outcome* dengan efek moderasi budaya nasional dari teori anomie kelembagaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam model ini masih merupakan ukuran perusahaan.

Model 3:

- Level 1 (tingkat-perusahaan):

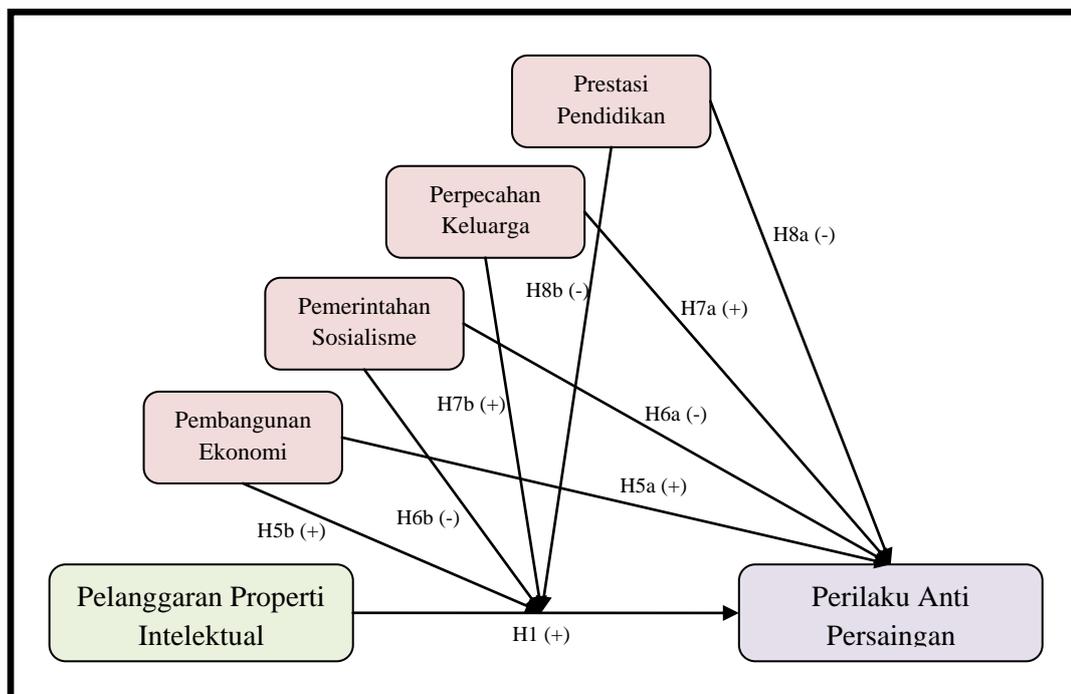
ANTICOMPETITIVE

$$= \beta_0 + \beta_1(VIOLATE) + \beta_3(FIRMSIZE) + r \quad (4.6)$$

- Level 2 (tingkat-nasional):

$$\beta_0 = \gamma_{00} + \gamma_{01}(ECONOMY) + \gamma_{02}(POLITY) + \gamma_{03}(FAMILY) + \gamma_{04}(EDUCATION) + u_0 \quad (4.7)$$

$$\beta_1 = \gamma_{10} + \gamma_{11}(ECONOMY) + \gamma_{12}(POLITY) + \gamma_{13}(FAMILY) + \gamma_{04}(EDUCATION) \quad (4.8)$$



Gambar 4. 4 Hubungan Model 3

Model ketiga menggambarkan hubungan antara perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang diperkirakan oleh pelanggaran kekayaan intelektual mereka bersama dengan prediktor kelembagaan sosial (ekonomi, sistem politik, perpecahan keluarga, dan tingkat pendidikan). Model ini menggunakan metode model linier hirarkis *intercept-as-outcome* dengan efek moderasi dari lembaga sosial teori anomie kelembagaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam model ini masih merupakan ukuran perusahaan.

4.3 Variabel Kontrol

Salah satu ciri perusahaan umum dikontrol, yang merupakan ukuran perusahaan. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia mendorong perusahaan untuk

menggunakan praktik yang tidak etis ketika perusahaan-perusahaan ini memberikan nilai pada bertahan hidup di pasar (Neubaum, et al., 2004). Sebuah penelitian membuktikan bahwa perusahaan yang lebih kecil dengan tidak memadainya sumber daya yang diperlukan menempatkan beban efisiensi pada ekonomi karena biaya produksi yang lebih tinggi untuk operasi mereka (Audretsch, 2002) dan dengan pasar global yang sangat kompetitif yang hadir di dunia saat ini kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan kecil menjadi bertekanan agar sesuai dengan perilaku menyimpang sebagai hasil dari pencapaian tujuan organisasi memuji (Messner, et al., 2007). Untuk perusahaan yang lebih kecil terdapat situasi di mana mereka bahkan dipaksa untuk melakukan praktek menyimpang (Zhou, dkk., 2011).

Salah satu ciri perusahaan umum dikontrol adalah ukuran perusahaan. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia akan mendorong perusahaan untuk menggunakan praktik yang tidak etis ketika perusahaan-perusahaan ini mementingkan untuk dapat bertahan hidup di pasar (Neubaum, et al., 2004). Sebuah penelitian membuktikan bahwa perusahaan kecil dengan situasi dimana tidak memadainya sumber daya yang diperlukan mereka dapat menempatkan beban efisiensi pada ekonomi karena biaya produksi mereka akan lebih tinggi untuk operasi mereka sehari-hari (Audretsch, 2002). Dengan pasar global yang sangat kompetitif pada saat ini, ada kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan kecil tertekan agar dapat melakukan perilaku menyimpang sebagai dampak dari pentingnya mencapai tujuan organisasi mereka (Messner, et al., 2007). Bahkan untuk perusahaan kecil terdapat situasi di mana mereka dipaksa untuk melakukan praktek menyimpang (Zhou, et al., 2011).

4.4 Sumber Data

Dengan adanya isu dari berbagai bangsa dan perusahaan mengenai konten praktek anti persaingan, penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber data sekunder yang mencakup konteks budaya, nasional, dan organisasi. Dengan sumber tersebut, akan memungkinkan untuk mengatur data yang dibutuhkan dengan cara

terstruktur di mana data akan berupa tingkatan yang terdiri dari tingkat perusahaan dan tingkat nasional.

Data tingkat perusahaan digunakan untuk merumuskan variabel dependen, hipotesis efek utama, dan variabel kontrol. Data tingkat perusahaan bersumber dari *World Business Environment Survey* (WBES) (World Business Environment Survey, 2000), sebuah studi multinasional komprehensif yang dilakukan oleh Bank Dunia secara paralel di delapan puluh negara di seluruh dunia. Survei ini merupakan upaya besar yang dilakukan oleh *the World Bank Group* dan lembaga mitranya untuk melaksanakan survei inti standar untuk mengevaluasi lingkungan bisnis perusahaan lintas negara. Di setiap negara setidaknya ada seratus perusahaan yang disurvei dengan metodologi seragam dan parameter paralel untuk struktur sampel. Dengan demikian, survei ini merupakan "langkah penting menuju standarisasi evaluasi dari kondisi mengenai investasi swasta" (Batra, et al., 2003) karena survey ini memberikan dasar untuk membuat perbandingan lintas negara dari kondisi lingkungan bisnis yang ada. Survei ini juga menyediakan pertanyaan yang berhubungan dengan praktek-praktek anti persaingan yang tentunya digunakan dalam penelitian ini. Dan juga, survei ini akan memungkinkan melakukan perbandingan mengenai keparahan yang mempengaruhi perusahaan.

Data survei ini dikumpulkan melalui wawancara pribadi, kecuali di Afrika yang dilakukan dengan surat, yang dilakukan kepada karyawan terqualifikasi pada tingkat manajerial dari masing-masing perusahaan. Tingkat respons yang didapat tinggi, dimana Afrika menduduki daftar paling bawah pada tingkat respons. Survei ini diterjemahkan dan diterjemahkan kembali ke bahasa asal untuk menegaskan konsistensi. Secara total, terdapat 10,032 perusahaan dari delapan puluh negara di seluruh dunia yang menanggapi kuesioner survey ini (World Business Environment Survey, 2000). Mayoritas perusahaan yang telah disurvei merupakan perusahaan kecil dan menengah, dimana sebagian besar dari mereka memiliki kurang dari seratus karyawan dan memiliki penjualan kurang dari US\$ 10 juta. WBES juga menyediakan variable control tingkat-perusahaan yang diperlukan untuk penelitian ini. Mengenai ukuran perusahaan, ukuran tersebut

didapat dari daftar kategori perusahaan: perusahaan kecil, menengah, dan besar. Ukuran perusahaan ini sebelumnya telah dikelola dalam daftar kategori oleh WBES dari banyaknya jumlah karyawan yang diberikan oleh responden.

Data tingkat-perusahaan yang digunakan untuk penelitian ini secara dominan merupakan perusahaan muda dan dari industri jasa. Meskipun ada banyak perusahaan industri lainnya seperti pertanian, konstruksi, dan lainnya, jumlahnya tidak sebanyak industri jasa. Konsisten dengan proporsi perwakilan perusahaan di seluruh dunia, sebagian besar perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan kecil hingga menengah.

Mengenai data tingkat-nasional, ada dua himpunan di mana data harus bersumber dari sumber yang berbeda. Untuk atribut budaya nasional yang termasuk dalam penelitian ini, sumber data yang diberikan oleh studi *Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness* (GLOBE) (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Survey, 2010) menyediakan data yang diperlukan untuk orientasi prestasi dan orientasi universalisme. Studi GLOBE dilakukan berdasarkan suatu penelitian sebelumnya mengenai lintas-budaya oleh Hofstede dan Trompenaars & Hampden-Turner. Studi GLOBE telah disebutkan sebagai "kemungkinan besar merupakan proyek yang paling canggih yang dilakukan pada penelitian bisnis internasional" (Leung, 2006). Studi GLOBE berisi data dari enam puluh dua Negara yang mengumpulkan pendapat lebih dari tujuh belas ribu manajer menengah di seluruh dunia dengan cita-cita dalam memajukan dan menyempurnakan variabel budaya. Metode yang dilakukan oleh studi GLOBE pada tahun 2004 telah dianjurkan dalam literatur juga (Smith, 2006). Pertanyaan yang digunakan untuk penelitian ini tercantum pada bagian lampiran. Untuk ukuran data individualisme, penelitian ini merujuk pada data yang disediakan Hofstede (Hofstede, et al.). Hofstede menyediakan salah satu penelitian orisinal mengenai individualisme yang telah digunakan secara luas oleh peneliti-peneliti di seluruh dunia.

Dan untuk data lembaga sosial bagi tingkat-nasional, data tersebut berasal dari sumber-sumber antara lain Bank Dunia (WB), Divisi Statistik PBB (UNSD), *Centers for Disease Control* (CDC), dan *United Nations Educational, Scientific*

and Cultural Organization (UNESCO). WB menyediakan data untuk ekonomi (The World Bank) dan sistem politik (The World Bank), lalu UNSD (United Nations Statistics Division) dan CDC (National Center for Health Statistics, 2010) menyediakan data yang diperlukan untuk ukuran keluarga kesejahteraan, sementara UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) menyediakan data yang diperlukan untuk ukuran pendidikan. Seperti halnya dengan langkah-langkah sebelumnya, sumber yang digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

Data dimensi budaya dimensi budaya yang digunakan untuk tujuan penelitian ini adalah gagasan "*should be*", "*the way things should be*" seperti yang dinyatakan dalam survei. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk fokus pada nilai aspirasi masyarakat dan bukan pada penilaian nilai yang ada. Oleh karena itu pendekatan ini akan menghindari kejanggalaan yang mungkin terjadi dengan penggunaan nilai-nilai yang eksisting (Javidan, et al., 2006). Sebuah penelitian sebelumnya juga melakukan pendekatan yang sama ketika menggunakan studi GLOBE (Martin, et al., 2007).

4.5 Pengolahan Data

Hipotesis dalam penelitian ini difokuskan pada efek utama tingkat-perusahaan serta efek utama tingkat-nasional pada perilaku anti persaingan. Model *random effects intercept-as-outcome* adalah pemodelan linear hirarkis yang digunakan untuk menguji hipotesis, dimana model ini konsisten digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa (Martin, et al., 2007) (Bame-Aldred, et al., 2011). Selanjutnya, hasil pengkalian dari variabel independen antara efek utama tingkat-perusahaan dengan efek utama tingkat-nasional juga diselidiki. Hal ini untuk menguji pengaruh moderasi dari budaya nasional dan lembaga-lembaga sosial pada perilaku yang tidak sesuai praktek anti persaingan.

Dari data WBES, ada beberapa pertanyaan survey yang digunakan. Inti penelitian data ini terletak pada variabel dependen perilaku anti persaingan, data hipotesis efek utama tingkat-perusahaan dari pelanggaran kekayaan intelektual, dan data

kontrol variabel penelitian. Semua bersumber dari WBES yang pertanyaannya tersedia di bagian lampiran dari penelitian ini.

Meskipun ada data dari delapan puluh negara di WBES, data tingkat-perusahaan yang digunakan untuk penelitian ini terbatas hanya pada empat puluh satu negara. Hal ini dikarenakan ketersediaan ukuran data dari studi GLOBE yang digunakan di model pada tingkat-nasional. Antara data WBES dan data GLOBE, sebuah model linier standar hirarkis membutuhkan fungsi identitas penghubung antaranya. Dan untuk kasus penelitian ini nama negara digunakan untuk tujuan ini, yang menghubungkan nama Negara dalam proyek GLOBE yang terdaftar dengan data nama Negara WBES. Dan untuk ukuran data GLOBE, output dari data yang diberikan berada dalam satu item untuk setiap sisi budaya yang diselidiki. Administrator GLOBE telah berhasil memperhitungkan berbagai pertanyaan yang mengukur satu konteks pertanyaan budaya yang umum. Realibilitas variabel *alpha* terbukti dengan yang dilaporkan oleh administratornya.

Tidak semua data yang digunakan penelitian ini lengkap dan langsung siap digunakan. Ada beberapa nilai yang hilang dalam output survei. Upaya dalam mengelola masalah ini telah dilakukan dengan tidak menggunakan variabel yang memiliki nilai-nilai yang hilang. Dengan demikian hasil akhir dari proses ini menyebabkan data secara signifikan berkurang dari data asli yang berpotensi sebanyak 10,032 perusahaan menjadi hanya sekitar lebih dari 2,000 perusahaan. Namun masalah muncul ketika jumlah unit tingkat-nasional tidak cukup banyak karena pemodelan linear hirarkis membutuhkan data dalam jumlah banyak. Dengan demikian, upaya kedua dan yang digunakan di penelitian ini untuk menganalisa dan mengisi *missing value* adalah dengan metode *expectation maximization* pada perangkat lunak SPSS. Lalu dengan jumlah data yang lebih memadai, yakni penggunaan sebanyak 5,488 data perusahaan di tingkat-perusahaan dan 41 negara di tingkat-nasional, model yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu untuk memodelkan pertanyaan penelitian dengan lebih baik. Perangkat lunak utama yang digunakan untuk tujuan penelitian ini adalah HLM 7 dari *Scientific Software International* (Raudenbush, et al., 2011).

Perangkat lunak ini menyediakan input spesifikasi pemodelan yang diperlukan ketika menggunakan model linear hirarkis.

Setelah melakukan pemeriksaan awal data, data yang dibutuhkan untuk variabel penelitian ini lalu diatur sesuai dengan model penelitian. Matriks korelasi variabel dan statistik deskriptif ditampilkan pada tabel 4.1. Tabel tersebut termasuk variabel tingkat-nasional serta variabel tingkat-perusahaan.

Tabel 4. 1 Korelasi Tingkat-Silang Pearson^{a,b}

Variabel	Rerata	s. d.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tindakan Anti Persaingan	2.34	1.13									
<i>Tingkat Perusahaan</i>											
2. Pelanggaran Properti Intelektual	2.32	1.00	.761								
<i>Tingkat Nasional</i>											
3. Orientasi Individualisme	39.85	24.35	-.083	-.107							
4. Orientasi Pencapaian	5.91	0.67	.061	.126	-.044						
5. Orientasi Egalitarianisme	4.52	0.46	-.119	-.004	.288	.431					
6. Pembangunan Ekonomi	8.46	1.34	-.517	-.380	.254	-.171	.542				
7. Kebijakan Sosialisme	15.69	5.71	-.291	-.238	.020	-.077	.236	.562			
8. Perpecahan Keluarga	1.47	0.92	-.421	-.445	.270	-.364	.102	.528	.365		
9. Pencapaian Pendidikan	90.43	8.50	-.085	.083	.053	-.133	.083	-.039	-.101	-.067	
<i>Kontrol</i>											
10. Ukuran Perusahaan	1.83	0.73	.086	-.026	-.161	.395	.169	-.237	-.262	-.372	.156

a. Korelasi lebih besar dari 0.421 signifikan pada $p < 0.01$ (2-ujung)

b. Korelasi lebih besar dari 0.364 signifikan pada $p < 0.05$ (2-ujung)

Output dari matriks tingkat korelasi-silang di atas berasal dari 5,488 perusahaan untuk tingkatperusahaan (level 1) dan 41 negara untuk tingkat-nasional (tingkat 2). Sampel negara termasuk Republik Ceko, Georgia, Hungaria, Kazakhstan, Polandia, Rusia, Slovenia, Albania, Turki, Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Meksiko, Venezuela, Cina, Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Zambia, Zimbabwe, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Portugal, Italia, Swedia, Argentina, Brasil, Kanada, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Mesir.

Perhitungan *Nonparametrik Pearson* digunakan karena beberapa tipe data merupakan ordinal serta skala. Data untuk variabel ekonomi tingkat-nasional ditransformasi dengan *log-n* karena adanya kecenderungan data berkerumun ke arah perekonomian yang lebih makmur. Tingkat korelasi silang dihitung dengan menetapkan variabel tingkat-nasional untuk setiap perusahaan dalam negara asalnya. Untuk menghindari disproporsi ukuran sampel dalam perhitungan di atas, semua indikator akan dibobotkan secara proporsional dengan ukuran sampelnya. Dengan pembobotan ini, tingkat korelasi nasional setara dengan korelasi yang didasarkan pada ukuran sampel tingkat-nasional jika diperhitungkan secara terpisah.

Karena sifat dari pemodelan linear hirarkis merupakan lanjutan dari regresi linier, masalah multikolinearitas harus ditangani dengan hati-hati. Sebagai pemeriksaan awal dari multikolinearitas, dari matriks korelasi silang tingkat diatas dicari koefisien korelasi yang di atas 0,8 karena angka ini menunjukkan sifat yang memiliki kemampuan penjelasan yang sama dengan variabel bebas yang bersangkutan. Hasilnya, tidak ada variabel dalam matriks korelasi silang tingkat yang memiliki nilai koefisien tinggi. Dan untuk skrining sekunder dari multikolinearitas, faktor inflasi varians (VIF) juga dilakukan. VIF ini merupakan sebuah indeks yang mengukur berapa banyak varians dari koefisien regresi yang diperkirakan meningkat karena kolinearitas. VIF dengan nilai 10 dan di atasnya menunjukkan probabilitas tinggi mengenai adanya multikolinieritas (Studenmund, 1992). Ambang batas VIF umum yang digunakan oleh peneliti adalah 3. Untuk penelitian ini, hasil semua angka VIF rendah yang berkisar antara nilai 1 sampai 2 dengan nilai maksimum 3,033 yang terjadi diantara variabel orientasi individualisme dan variabel pembangunan ekonomi. Set pengecekan VIF yang lengkap tersedia di bagian lampiran dari penelitian ini.

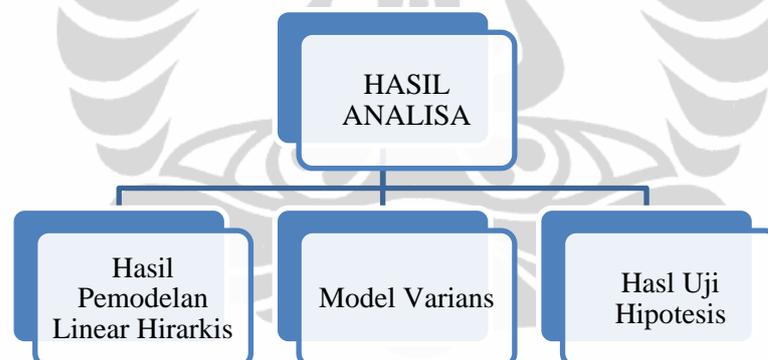
Agar model linier hirarkis dapat menganalisis kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktek anti persaingan karena pelanggaran yang dialaminya terhadap kekayaan intelektual, yang disertai dengan kontrol tingkat perusahaan, item-item variabel tersebut akan dipusatkan pada rerata kelompok. Data perusahaan yang dipusatkan ini menghasilkan hasil yang lebih baik dari data yang tidak dipusatkan.

Lagipula data terpusat juga memberikan wawasan yang lebih baik mengenai cara untuk menjelaskan hasil dari model (Hofmann, et al., 1998). Dan untuk data tingkat-nasional bangsa, karena ada efek interaksi, item-item variabel berpusat di sepanjang rerata (Raudenbush, et al., 2002). Namun demikian, penggunaan pemusatan mengenai apakah perlu dipusatkan atau tidak dipusatkan masih diperdebatkan sebagai "tidak ada pilihan statistik yang pasti benar" (Kreft, et al., 1994). Semuanya tergantung pada sifat dari penelitian yang diinginkan oleh peneliti.

Prosedur model hirarki linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *random effects intercept-as-outcome*. Dengan metode ini, penelitian ini mengakui keterbatasan dari hasil model yang ditarik dari sample populasi. Selanjutnya, dengan *random effects*, analisis pengaruh variabel tingkat-perusahaan dipisahkan di dalam masing-masing negara. Ini berarti untuk prediktor hipotesis perilaku anti persaingan di tingkat-perusahaan didasarkan pada penyimpangan norma negaranya. Dengan mengetahui hal di atas tersebut, pemusatan variabel tingkat-perusahaan dari variabel tingkat-nasional menunjukkan bahwa tingkat kemiringan (*slope*) yang dihasilkan dalam negara tersebut didasarkan pada penyimpangan dari norma-norma negaranya. Hipotesis tingkat-nasional diuji dengan model *random effects intercept-as-outcome* yang memprediksi perbedaan perilaku negara tentang anti persaingan di tingkat-perusahaan sekaligus mempertimbangkan efek tingkat-perusahaan dan variable kontrol di negara masing-masing.

BAB 5 HASIL ANALISA

Dalam bab ini, akan ada hasil analisis dari hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dalam penelitian ini. Variansi model dengan pendekatan HLM serta hasil hipotesis akan disajikan dalam bab ini. Delapan hipotesis akan menguji pengaruh konteks teori anomie kelembagaan. Efek moderasi variabel tingkat-nasional dibagi menjadi dua bagian, kebudayaan nasional dan lembaga sosial, di mana masing-masing akan memiliki model yang berbeda dalam upaya untuk menjelaskan hubungan mereka dengan variabel dependen terkait. Secara keseluruhan, bab ini memiliki garis besar sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Garis besar Bab 5

5.1 Hasil Pemodelan Linear Hirarkis

Tabel 5. 1 Hasil analisis HLM pada tindakan anti persaingan

Variabel	Arah Hipotesa	Model 1 (0.938)		Model 2 (0.923)		Model 3 (0.897)	
		b	s. e.	b	s. e.	b	s. e.
<u>Hipotesis Efek Utama Tingkat Perusahaan</u>							
Pelanggaran Properti Intelektual (A)	(+)	0.25	*** 0.02	0.25	*** 0.02	0.25	*** 0.02
<u>Efek Utama Tingkat Nasional</u>							
Budaya Nasional							
Orientasi Individualisme	(+)			-0.08	*** 0.00		
Orientasi Pencapaian	(+)			-0.07	0.06		
Orientasi Egalitarianisme	(+)			0.06	0.11		
Lembaga Sosial							
Pembangunan Ekonomi	(+)					-0.18	*** 0.05
Kebijakan Sosialisme	(-)					-0.00	0.01
Perpecahan Keluarga	(+)					-0.03	0.04
Pencapaian Pendidikan	(-)					0.02	*** 0.06
<u>Hipotesis Efek Moderasi Tingkat Nasional</u>							
Budaya Nasional							
Orientasi Individualisme x (A)	(+)			0.00	0.00		
Orientasi Pencapaian x (A)	(+)			-0.09	*** 0.02		
Orientasi Egalitarianisme x (A)	(+)			0.14	*** 0.04		
Lembaga Sosial							
Pembangunan Ekonomi x (A)	(+)					0.06	** 0.02
Kebijakan Sosialisme x (A)	(-)					-0.00	0.00
Perpecahan Keluarga x (A)	(+)					0.00	0.01
Pencapaian Pendidikan x (A)	(-)					0.00	* 0.00
<u>Kontrol</u>							
Ukuran Perusahaan		-0.05	* 0.02	-0.05	0.02	-0.05	* 0.02

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

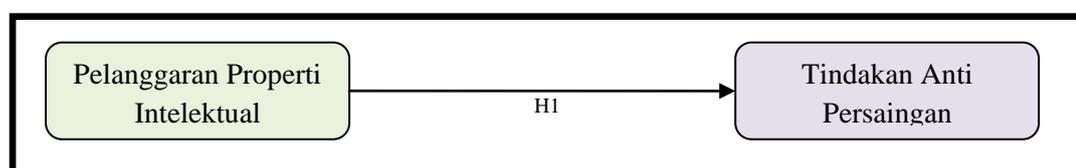
Tabel di atas memberikan hasil dari pendekatan HLM dengan model *intercept-as-outcome* pada pertanyaan penelitian yang diajukan. Ada tiga model yang diperlukan untuk menguji hipotesis penelitian. Model 1 menguji hipotesis pengaruh utama tingkat-perusahaan pada kecenderungan bagi perusahaan untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan. Model 2 menguji hipotesis pengaruh

utama tingkat-perusahaan dengan moderasi budaya bangsa tingkat-nasional pada kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan. Dan model terakhir, Model 3, menguji hipotesis pengaruh utama tingkat-perusahaan dengan moderasi lembaga sosial tingkat-nasional pada kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan.

5.2 Model Varians

Varians yang timbul dengan penggunaan HLM bisa diidentifikasi dan ditampilkan untuk dapat lebih memahami kekuatan HLM (Raudenbush, et al., 2011). Varians tingkat-nasional dijabarkan dalam setiap model dengan model presentase yang menjelaskan dari varians total. Untuk varians tingkat-nasional di setiap model, Model 1 menyajikan 17,3%, Model 2 menyajikan 17,7%, dan Model 3 menyajikan 18%. Sedangkan untuk nilai korelasi dari *intercept* dengan *slope* masing-masing model, Model 1 menyajikan 0,109, Model 2 menyajikan 0,085, dan Model 3 menyajikan 0,061. Presentase varians total model-yang-terjelaskan juga tersedia dari output analisis HLM. Model 1 menyajikan nilai 93,8%, Model 2 menyajikan nilai 92,3%, dan Model 3 menyajikan nilai 89,7%. Jumlah presentase model-yang-terjelaskan ini dianggap baik bagi para pakar model HLM dimana ambang batas yang dianjurkan adalah di atas 80% (Raudenbush, et al., 2002).

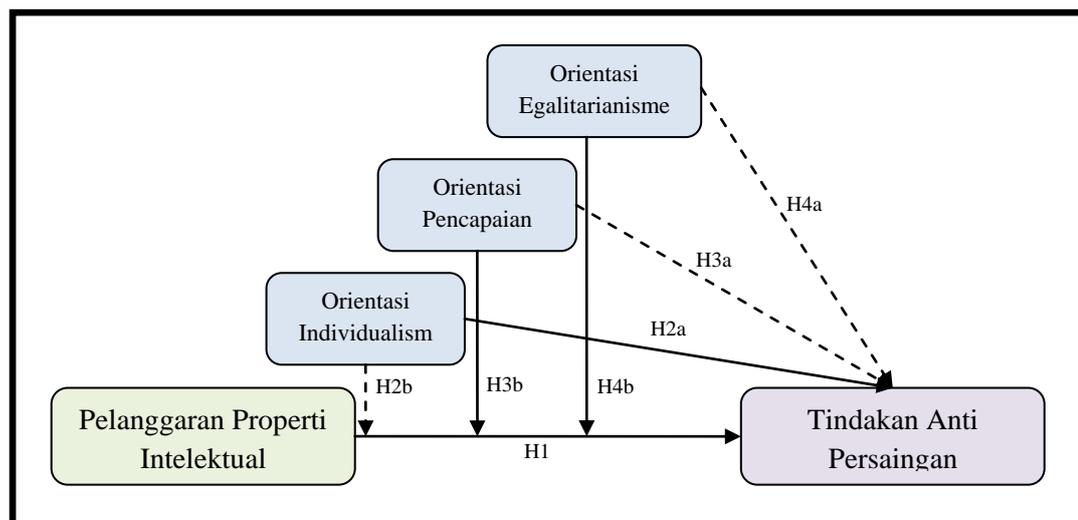
5.3 Hasil Uji Hipotesis



Gambar 5. 2 Hasil hubungan Model 1

Hipotesis 1

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dan positif terhadap perilaku anti persaingan perusahaan. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung oleh hasil HLM dalam tiga model yang diuji. Arah hubungannya adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh dugaan dan secara statistik signifikan (Model 1 $p < 0,001$, Model 2 $p < 0,001$, dan Model 3 $p < 0,001$).



Gambar 5.3 Hasil hubungan Model 2

Hipotesis 2a

Hipotesis kedua (2a) menyatakan bahwa tingkat orientasi individualisme nasional positif berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung dalam hasil HLM. Arah hubungan adalah ke arah yang berlawanan dan juga signifikan secara statistik ($p < 0,001$).

Hipotesis 2b

Hipotesis kedua (2b) menyatakan bahwa tingkat orientasi individualisme nasional memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan yang dikarenakan oleh pelanggaran kekayaan intelektual. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak sepenuhnya didukung dalam hasil HLM.

Arah hubungan adalah seperti yang ditunjukkan oleh dugaan namun tidak signifikan secara statistik.

Hipotesis 3a

Hipotesis ketiga (3a) menyatakan bahwa tingkat orientasi pencapaian nasional positif berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung dalam hasil HLM. Arah hubungan tidak sebagaimana dinyatakan oleh teori dan tidak signifikan secara statistik pula.

Hipotesis 3b

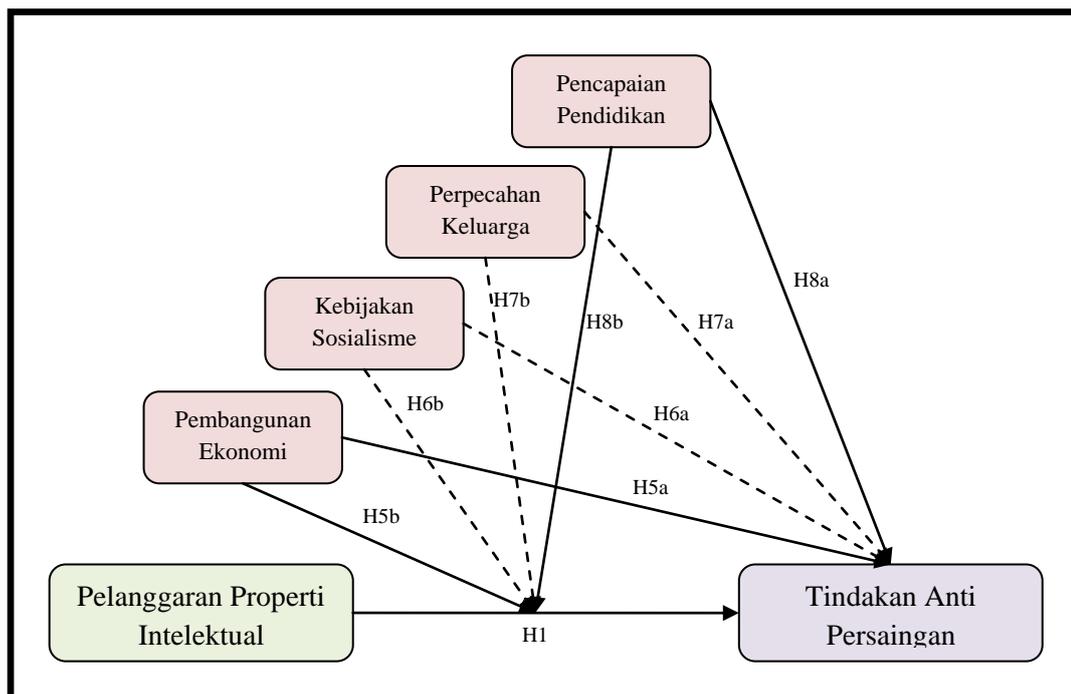
Hipotesis ketiga (3b) menyatakan bahwa tingkat orientasi pencapaian nasional memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung dalam hasil HLM. Arah hubungan tidak sebagaimana diatur oleh teori dan secara statistik tidak signifikan dalam arah berlawananannya ($p < 0,001$).

Hipotesis 4a

Hipotesis keempat (4a) menyatakan bahwa tingkat orientasi egalitarianisme nasional positif berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak sepenuhnya didukung oleh hasil HLM. Arah hubungan adalah seperti apa yang telah dihipotesiskan namun tidak ada indikasi signifikan secara statistik.

Hipotesis 4b

Hipotesis keempat (4b) menyatakan bahwa tingkat orientasi egalitarianisme nasional memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung oleh hasil HLM baik dalam arah hubungannya maupun signifikan secara statistik ($p < 0,001$).



Gambar 5. 4 Hasil hubungan Model 3

Hipotesis 5a

Hipotesis kelima (5a) menyatakan bahwa tingkat pembangunan ekonomi suatu negara positif berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Berdasarkan hasil HLM, hipotesis ini tidak didukung hubungan arah teori namun juga signifikan secara statistik pada $p < 0,001$.

Hipotesis 5b

Hipotesis kelima (5b) menyatakan bahwa tingkat pembangunan ekonomi suatu negara memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil HLM, hipotesis ini didukung penuh dengan memiliki arah hubungan sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis dan dengan signifikansi statistik pada $p < 0,01$.

Hipotesis 6a

Hipotesis keenam (6a) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat system kebijakan sosialisme negara secara negatif berhubungan dengan perusahaan-

perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis HLM ini tidak sepenuhnya didukung dalam arti bahwa secara statistik tidak signifikan. Meskipun demikian arah hubungannya adalah dari apa yang hipotesis telah ditetapkan.

Hipotesis 6b

Hipotesis keenam (6b) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat sistem kebijakan sosialisme negara memiliki moderasi negatif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis HLM ini tidak sepenuhnya didukung dalam arti bahwa secara statistik tidak signifikan. Meskipun demikian arah hubungan adalah dari apa yang hipotesis telah ditetapkan.

Hipotesis 7a

Hipotesis ketujuh (7a) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat perpecahan keluarga negara telah positif berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Hasil HLM menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung dimana secara statistik tidak signifikan. Arah hubungan hipotesis juga apa yang berlawanan dari yang ditetapkan.

Hipotesis 7b

Hipotesis ketujuh (7b) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat perpecahan keluarga negara memiliki moderasi positif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Hasil HLM menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak sepenuhnya didukung dalam arti bahwa hasil HLM secara statistik tidak signifikan. Namun arah hubungan hipotesis adalah dari apa yang telah ditetapkan.

Hipotesis 8a

Hipotesis kedelapan (8a) yang ditetapkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pencapaian pendidikan negara secara negatif berhubungan dengan perusahaan-perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Hasil analisis

menunjukkan bahwa HLM hipotesis tidak didukung dalam arah hubungannya. Signifikansi dari koefisien statistic juga pada arah yang berlawanan dari penetapan teori ($p < 0,001$).

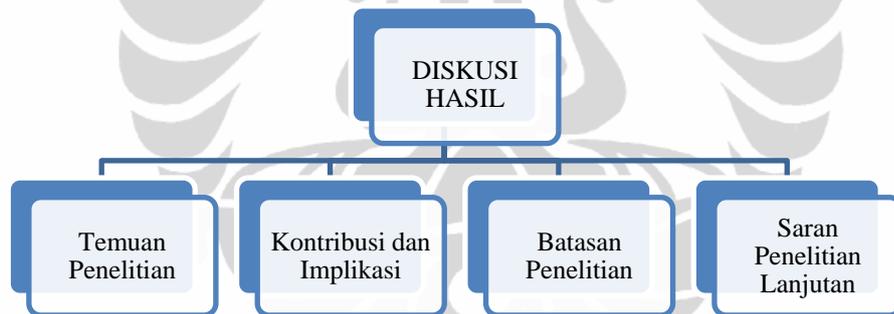
Hipotesis 8b

Hipotesis kedelapan (8b) yang ditetapkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pencapaian pendidikan negara memiliki moderasi negatif bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Hasil analisis menunjukkan bahwa HLM hipotesis tidak didukung baik dalam arah hubungannya serta signifikansi statistiknya.



BAB 6 PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan temuan dari penelitian. Penjelasan singkat akan dijelaskan bersama dengan hipotesis yang relevan dan pandangan pendukungnya. Lalu kontribusi dan implikasi bagi perusahaan dan regulator pemerintah disajikan dalam konteks teori anomi kelembagaan. Seperti penelitian lain, ada keterbatasan pada bagaimana temuan dari penelitian ini untuk dapat digunakan secara kontekstual. Pada bagian terakhir bab ini, peluang dan kemungkinan penelitian lanjut di masa depan disajikan dengan pertimbangan lain dan penekanan yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Gambar berikut menggambarkan struktur dari bab ini.



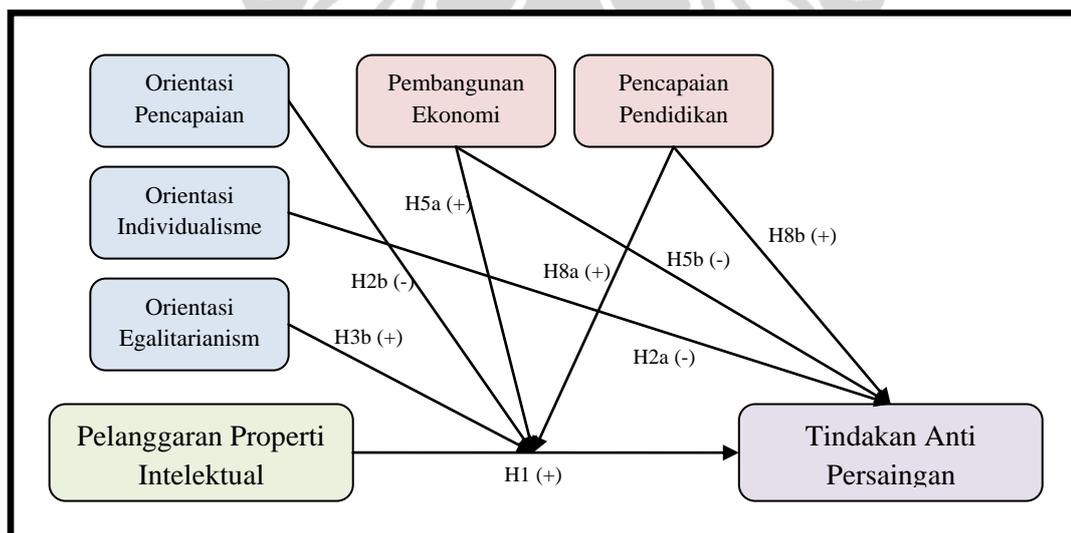
Gambar 6. 1 Garis besar Bab 6

6.1 Temuan Penelitian

Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual mereka. Teori anomi kelembagaan digunakan untuk memberikan kerangka teoritis untuk memahami dinamika perilaku menyimpang bagi perusahaan-perusahaan di beberapa negara. Pendekatan bertingkat yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat memajukan dan menyempurnakan teori dasar yang pertama kali dikembangkan oleh Durkheim, Merton, lalu Messner dan Rosenfeld. Dalam

konteks teori anomie kelembagaan, penelitian ini mengedepankan efek utama tingkat-perusahaan dari pelanggaran kekayaan intelektual dengan efek moderasi dari budaya nasional dan lembaga-lembaga sosial terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan.

Dengan empat puluh satu negara dimana terdapat lebih dari 5.000 perusahaan yang diselidiki, metode analisis bertingkat yang digunakan untuk penelitian ini dapat memberi wawasan makro pada perusahaan-perusahaan lintas-budaya. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini berhubungan dengan variabel tingkat-perusahaan dan tingkat-nasional mengenai keterlibatan perusahaan dalam praktek-praktek anti persaingan. Dengan demikian, pengkonsolidasian teori anomie kelembagaan dapat terjadi demi pemahaman yang lebih baik mengenai peranan teori anomie kelembagaan dalam bidang manajemen. Ada tiga model yang diuji dalam penelitian ini dimana masing-masing model berkaitan dengan pengaruh prediktor yang berbeda dari efek tingkat-nasional. Dengan melakukan ini, predictor efek moderasi tingkat-nasional seperti kebudayaan nasional dan lembaga-lembaga sosial dapat dipelajari secara terpisah tanpa adanya kerancuan.



Gambar 6. 2 Hasil representasi model

Gambar di atas merupakan hasil penelitian dari model variabel-variabel yang secara statistik signifikan. Dari semua variabel yang termasuk dalam teori anomie kelembagaan, hanya satu variabel dari budaya nasional (orientasi egalitarianisme) dan satu variabel lain dari lembaga sosial (pembangunan ekonomi) yang memiliki efek moderasi sebagai mana teori anomie kelembagaan menyatakan bahwa kecenderungan bagi perusahaan dalam melakukan anti persaingan adalah akibat dari perilaku pelanggaran kekayaan intelektual. Hasil efek moderasi menunjukkan bahwa ketika pembangunan ekonomi dan orientasi egalitarianisme kuat, akan ada pengaruh kecenderungan yang lebih tinggi bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Penjelasan yang lebih lengkap dari seluruh variabel yang digunakan akan dijelaskan dalam bagian berikut.

Teori anomie kelembagaan menetapkan bahwa bagi pihak yang terlibat dalam perilaku menyimpang akan dipengaruhi oleh budaya nasional dan lembaga sosial. Adapun efek utama tingkat-nasional, sebagian besar temuan kontradiktif terhadap teori dapat ditemukan. Dalam konteks budaya nasional, orientasi individualisme menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat individualisme akan memiliki kecenderungan lebih besar bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Hal ini didukung oleh signifikansi statistiknya ($p > 0,001$). Individualisme yang lebih rendah dapat diterjemahkan bahwa dalam kelompok yang terintegrasi secara lebih baik, mereka akan saling melindungi demi mencapai tujuan kolektifnya. Kontrol sosial memiliki pegangan yang lebih baik atas pikiran kolektif lebih daripada pikiran individu. Apa yang temuan ini tunjukkan adalah bahwa ini mungkin menjadi indikasi halus masyarakat sekarang sedang menghadapi perilaku egosentris kolektif di mana norma-norma tradisional yang telah ditegakkan dilanggar. Perusahaan mungkin bertindak dengan cara tertentu yang tidak sesuai dengan mengetahui bahwa tindakan “saling pengertian” akan menyebabkan kesempatan yang lebih baik untuk sukses.

Menurut teori anomie kelembagaan, orientasi individualisme akan mengarah pada tindakan menyimpang. Efek moderasi dari orientasi karena pelanggaran kekayaan intelektual tidak dapat menjelaskan dari hipotesis yang telah ditetapkan

sebelumnya. Arah hubungan tetap dalam arah yang ditetapkan tanpa signifikansi statistik yang dibutuhkan. Tindakan individualisme antara perusahaan menyajikan kehendak untuk suatu keberhasilan dengan mengorbankan tujuan kolektif, dengan demikian membuat perusahaan tertekan untuk menggunakan perilaku menyimpang seperti tindakan anti persaingan.

Orientasi prestasi juga menunjukkan hasil yang kontradiktif terhadap hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa dengan orientasi prestasi lebih rendah akan membuat tekanan yang lebih besar bagi perusahaan untuk berperilaku secara anti persaingan. Salah satu alasan yang mungkin hasil terletak pada kendala karena sistem stratifikasi sebagaimana Merton berpendapat (Merton, 1938). Pemahaman ini berlaku untuk hasil individualisme juga. Perusahaan yang berprestasi atau sukses akan memiliki kecenderungan lebih sedikit untuk beralih pada perilaku menyimpang karena mereka tahu bagaimana memainkan permainan mereka. Perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya lebih baik dan tahu bagaimana mengelolanya. Perusahaan yang tidak berhasil atau perusahaan yang berusaha untuk berprestasi mungkin dapat menggunakan tindakan menyimpang untuk mendapatkan pondasi kesuksesan mereka. Keterbatasan sumber daya dan keterbatasan pengetahuan dijabarkan mereka menjadi rintangan yang harus mereka atasi untuk menjadi sukses.

Namun, temuan lain yang kontradiktif terhadap teori anomie kelembagaan terletak pada moderasi dari hasil orientasi pencapaian. Hasil menunjukkan bahwa arah hubungan adalah sebaliknya dan secara statistik signifikan pula. Sesuai dengan teori ini, penitikberatan pada pencapaian akan menyebabkan perilaku menyimpang. Untuk perusahaan yang menitikberatkan inovasinya pada tujuan organisasi dan menjadi aktivitas sehari-harinya, mereka akan menghadapi tekanan yang meningkat untuk terlibat dalam perilaku menyimpang karena keputusan mereka akan terpengaruhi. Namun demikian temuan menunjukkan bahwa orientasi pencapaian akan memiliki hubungan arah yang berlawanan. Mungkin bahwa meskipun perusahaan memiliki titik berat pada tujuan organisasi mereka, perusahaan mungkin terpaksa bersifat memaklumi untuk mengamankan tujuan mereka. Perilaku keengganan mereka ini untuk mengambil risiko merupakan ciri-

ciri perusahaan yang bersifat menghindari ketidakpastian, di mana hasil yang tidak diinginkan ketika perusahaan dibenarkan menyimpang akan membawa mereka ke dalam situasi yang sulit untuk beroperasi dan bertahan.

Untuk orientasi egalitarianisme, temuan penelitian menunjukkan bahwa arah hubungan sesuai dengan hipotesis penelitian. Memiliki kesempatan yang adil bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan akan membuka peluang yang sama bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat terlibat dalam perilaku menyimpang. Penilaian yang mendasari konteks ini didasarkan pada kemampuan, bukan kriteria partikularistik, yang dapat menyebabkan perusahaan untuk semakin berusaha menuju tujuan organisasi. Namun hasil yang didapat menunjukkan bahwa hal tersebut tidak memiliki signifikansi untuk sepenuhnya mendukung hipotesis.

Dalam prediktor budaya nasional, hanya moderasi orientasi egalitarianisme yang sepenuhnya didukung. Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai egalitarianisme yang lebih tinggi akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk perusahaan dalam melakukan perilaku menyimpang. Simbolisasi dari budaya nasional ke egalitarianisme bagi perusahaan dalam memiliki kesempatan yang sama untuk sukses telah menciptakan tekanan bagi perusahaan dalam melakukan perilaku menyimpang untuk berhasil di pasar terbuka.

Sisi lain dari subset teori anomie kelembagaan adalah lembaga sosial. Untuk hipotesis pembangunan ekonomi, hasilnya menunjukkan bahwa dengan perkembangan ekonomi yang kurang memadai akan mempengaruhi perusahaan untuk memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan perilaku anti persaingan. Hal ini berbeda dari apa yang sebelumnya telah dihipotesiskan dalam penelitian dan juga ternyata hal ini signifikan secara statistik ($p > 0,001$). Penjelasan untuk ini adalah ketika sebuah negara sudah berkembang dan memiliki dasar yang kuat, perusahaan-perusahaan mungkin akan dapat menahan diri dalam melakukan melakukan tindakan menyimpang yang dapat membahayakan posisi unggul mereka. Dengan dukungan perkembangan ekonomi negara yang cukup, akan ada “penyangga” bagi perusahaan dari negara apabila tujuan organisasi mereka tidak dapat dipenuhi. Pandangan ini juga mencakup gagasan bahwa

perusahaan yang sudah makmur mungkin akan lebih bersedia mengambil peluang dan risiko.

Efek moderasi lembaga-lembaga sosial juga merupakan subjek penting karena menyediakan tempat dan aturan di mana masyarakat, termasuk perusahaan, dapat beroperasi. Penelitian menemukan bahwa tingkat moderasi pembangunan ekonomi akan menyebabkan kecenderungan yang lebih tinggi bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual mereka. Pembangunan ekonomi memberikan tekanan pada norma-norma sosial dalam dominasi struktur sosial ekonomi (Passas, 2000). Menempatkan fokus pada pembangunan ekonomi dimana kekayaan intelektual merupakan tumpuannya, akan dapat mendorong perusahaan untuk bertindak dengan cara menyimpang dengan mentalitas mencapai tujuan dengan segala cara. Dengan demikian, titik pandang yang mementingkan diri sendiri akan menempatkan perusahaan ke posisi yang lebih rapuh dalam membuat keputusan demi mencapai tujuan organisasi mereka.

Salah satu hasil temuan yang kontras dari penelitian ini adalah bahwa efek moderasi utama pencapaian pendidikan pada tingkat-nasional dalam perilaku anti persaingan dari lembaga-lembaga sosial berlawanan dari apa yang telah ditetapkan oleh hipotesis serta teori anomi kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa dengan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dari anggota perusahaan akan mengarah pada kecenderungan yang lebih bagi perusahaan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, dan ini juga sejalan dengan dorongan dari perilaku menyimpang karena pelanggaran kekayaan intelektual. Penjelasan kemungkinan ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang terdidik tahu aturan luar dalam dan memiliki pengetahuan untuk membuat jalan mereka dengan cara yang tidak konvensional untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan mereka organisasi. Tindakan tersebut dapat mereka lakukan selazim mungkin dimana sebagian besar masyarakat dan perusahaan lain mungkin tidak akan mengetahui tindakan tersebut. Mereka yang memiliki pencapaian pendidikan yang lebih baik kemungkinan akan dididik secara penuh dan adil, di mana untuk belajar yang baik dan buruk juga tidak terbatas bagi mereka.

Mengenai pengaruh kebijakan sosialisme, baik efek utama tingkat-nasional dan hipotesis efek moderasi tingkat-nasional memiliki arah hubungan yang sama. Namun temuan dari penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung hipotesis yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, arah hubungan output masih seperti yang disarankan oleh hipotesis. Dalam orientasi kebijakan sistem sosialis, manfaat redistributif yang disediakan oleh sistem politik tersebut akan mengurangi dorongan bagi perusahaan untuk mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, hal tersebut akan menghambat perusahaan untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan menyimpang, secara khusus dalam bidang perusahaan properti intelektual. Sistem politik sosialis juga mengurangi ketergantungan perusahaan pada kekuatan pasar kompetitif yang mungkin akan meningkatkan kesalahan perhitungan dalam pengambilan keputusan yang perlu sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ditegakkan. Manfaat redistribusi bagi semua lapisan masyarakat akan menghasilkan keadaan yang lebih stabil, di mana perusahaan dapat menikmati pasar yang lebih aman dan dilindungi dalam operasi mereka.

Teori anomie kelembagaan menetapkan bahwa institusi sosial keutuhan keluarga akan mengarah pada perilaku sosial yang lebih konservatif. Ketika perusahaan berada di tengah-tengah masyarakat dengan institusi keutuhan keluarga yang kuat, maka perannya dalam integrasi sosial dan pemberian dukungan emosional juga kuat. Perusahaan akan cenderung untuk mematuhi norma-norma yang ditegakkan dengan insentif yang lebih rendah untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang. Peran keluarga akan membawa masyarakat serta perusahaan-perusahaan di dalamnya untuk orientasi yang lebih murah hati terhadap lingkungan. Nilai-nilai post-materialisme juga bisa muncul di mana kualitas hidup adalah tujuan utama perusahaan. Namun demikian temuan dari penelitian ini kontras. Adapun efek utama tingkat-nasional berada pada arah yang berlawanan dari apa yang telah ditetapkan hipotesis, hal ini menunjukkan bahwa dengan rendahnya perpecahan keluarga diterjemahkan menjadi kecenderungan lebih bagi perusahaan dalam melakukan perilaku anti persaingan. Namun efek moderasi tingkat-nasional menunjukkan bahwa perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh perusahaan karena pelanggaran kekayaan intelektual mereka menunjukkan

pada arah hipotesis yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tidak ada signifikansi statistik yang mendukung hipotesis tersebut.

6.2 Kontribusi dan Implikasi

Penelitian ini merupakan awal dari studi kelanjutan perilaku anti persaingan di ranah teori anomie kelembagaan. Karena penelitian mengenai hal ini sangat terbatas, penelitian ini dapat menjadi hal penting dalam pengembangan teori anomie kelembagaan begitu pula dengan kepentingan praktikalnya dalam memahami fenomena serupa yang sedang terjadi.

Dengan memahami hasil penelitian ini, akan dapat memberikan perusahaan dan regulator pemerintah wawasan dalam menangani perilaku anti persaingan di pasar dengan lebih teliti. Dengan ini, desain teknik regulasi yang efektif dapat menghambat perilaku menyimpang yang mencakup kepentingan lembaga dan nilai budaya yang berlaku di negara yang bersangkutan. Dan untuk perusahaan sendiri, memahami tentang bagaimana nilai-nilai budaya bangsa dan lembaga yang ada dalam mendukung operasi mereka akan memberi posisi lebih baik bagi perusahaan dalam berinteraksi di pasar sehingga dapat menghindari perilaku menyimpang.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa teori anomie kelembagaan diteliti untuk dapat lebih memahami dan menjelaskan fenomena anti persaingan yang terjadi, terutama dalam bidang kekayaan intelektual. Berita-berita terbaru mengenai litigasi di seluruh dunia telah menarik perhatian lebih bagi para peneliti serta perusahaan untuk mempelajari bagaimana untuk dapat menghindari atau membela diri dalam kasus litigasi yang dialami perusahaan. Nilai-nilai budaya dan lembaga sosial berperan dalam dimensi ini dan mampu membuat kontribusi dalam memahami prediktor perilaku anti persaingan dari pelanggaran kekayaan intelektual.

Menarik kesimpulan dari model penelitian digunakan, terdapat bukti empiris bahwa perilaku anti persaingan akibat pelanggaran properti intelektual didukung dengan signifikansi statistik. Perilaku anti persaingan yang terjadi untuk

perusahaan yang mengelola pertumbuhan mereka terjadi terutama di ranah kekayaan intelektual. Dan bila ada pelanggaran kekayaan intelektual akan ada kemungkinan perusahaan melakukan perilaku menyimpang demi mencapai tujuan organisasi mereka.

Model yang diuji adalah mengenai apakah adanya pengaruh kebudayaan tingkat-nasional memiliki hubungan dengan perilaku anti persaingan, dan juga serta efek moderasi perilaku anti persaingan karena kekayaan intelektual. Adapun efek utama, output dari hasil HLM menunjukkan bahwa sekarang orientasi individualisme di perusahaan tidak selalu melibatkan tingkat perilaku anti persaingan yang lebih tinggi. Mungkin saja dalam situasi saat ini, perusahaan kecil dan juga perusahaan yang muda sekarang terlibat secara kolektif untuk bersaing di pasar untuk mencegah kemungkinan berperilaku dengan tindakan menyimpang, seperti tindakan anti persaingan. Hasil yang didapat mengimplikasikan bahwa perusahaan kecil dan perusahaan yang muda akan lebih rentan terhadap resiko. Dengan demikian, dengan menyokong resiko mereka bersama-sama dengan perusahaan lain akan menjadi cara yang layak bagi mereka untuk dapat bertahan hidup di pasar.

Pengaruh moderasi orientasi prestasi antara perilaku anti persaingan dan pelanggaran kekayaan intelektual mengindikasikan bahwa perusahaan yang berprestasi tinggi berorientasi dapat meredam laju perusahaan untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual. Dengan menyadari hukuman yang mungkin dihadapi perusahaan saat melanggar hukum, perusahaan-perusahaan ini mungkin memakai cara etis yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi mereka. Perusahaan kecil dan perusahaan muda khususnya akan lebih rentan daripada perusahaan besar dan yang mapan, sehingga mereka akan lebih banyak menghadapi risiko yang merugikan.

Sesuai dengan teori anomie kelembagaan, budaya nasional orientasi egalitarianisme negara tidak memainkan peran perilaku anti persaingan. Orientasi dari efek moderasi ini mendorong tindakan perilaku menyimpang ketika kekayaan intelektual dari suatu perusahaan dilanggar. Kesempatan adil bagi perusahaan untuk mencapai tujuan mereka akan memberikan tekanan anomie bagi mereka

untuk membenarkan cara yang paling praktis dan layak terlepas dari nilai etis yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan adanya persaingan di pasar. Dengan demikian, kita mungkin melihat bahwa dengan pandangan partikularistik yang berkurang seiring waktu karena hak yang sama bagi setiap perusahaan untuk bersaing, maka akan memungkinkan untuk meningkatnya tingkat perilaku anti persaingan dari perusahaan.

Adapun lembaga-lembaga sosial dari teori anomie kelembagaan, kemakmuran suatu negara tidak menunjukkan tingkat perusahaan untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan. Ini mungkin menunjukkan bahwa, sebagai keseluruhan, dominasi ekonomi suatu negara tidak menghasilkan perilaku menyimpang. Namun sebaliknya, dalam bidang kekayaan intelektual, dominasi ekonomi suatu negara tidak mempromosikan tingkat yang lebih tinggi perilaku anti persaingan yang diakibatkan oleh pelanggaran kekayaan intelektual. Ini berarti bahwa kekayaan intelektual, seperti paten yang saat ini dilihat sebagai “mesin” perusahaan, dapat menghasilkan keuntungan dan kekayaan berkelanjutan bagi perusahaan khususnya bagi perusahaan kecil dan muda, seperti kewirausahaan. Pertimbangan ekonomi yang berpengaruh pada keputusan perusahaan dapat membuat keputusan perusahaan yang salah dalam penalaran yang seharusnya logis dan etis. Sehingga, hal tersebut dapat membuat perusahaan-perusahaan lebih agresif, kompetitif, dan tujuan yang berorientasi pada aspek ekonomi yang berlebihan.

Namun, prestasi pendidikan suatu negara menunjukkan hasil yang kontradiktif dengan apa yang teori anomie kelembagaan telah ditetapkan. Meskipun pencapaian pendidikan tinggi seharusnya akan dapat mengurangi perilaku anti persaingan, tampaknya tidak demikian. Hal ini menyiratkan bahwa pencapaian pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu perusahaan akan bertindak sesuai dengan moralitas yang baik. Perusahaan yang terutama terdiri dari karyawan berpendidikan lebih baik mungkin akan memiliki informasi dan pemahaman lebih tentang bagaimana melakukan segala sesuatu lebih baik, praktis, dan efisien. Dengan wawasan ini, adalah mungkin bahwa pencapaian pendidikan yang lebih baik akan membuat mereka sadar apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi mereka, terlepas dari etika-etika yang perlu dihormati. Khusus untuk perusahaan-

perusahaan yang berurusan dengan kekayaan intelektual sebagai sumber utama penghasilan mereka, mereka biasanya merupakan perusahaan yang inovatif, yang mendorong usaha mereka untuk melakukan hal-hal yang berbeda dimana mereka tidak membatasi diri dalam melakukan hal-hal tertentu di pasar. Tindakan tersebut akhirnya bisa berarti dalam bertindak menyeleweng sehingga pada akhirnya menjadi tindakan anti persaingan bila ada pelanggaran properti intelektual terhadap perusahaan mereka.

6.3 Batasan Penelitian

Dengan pendekatan yang dilakukan di penelitian ini, penelitian ini bukan tanpa keterbatasan. Karena sifat surveinya adalah konteks nasional, sifat yang melekat pada penelitian ini berfokus pada sisi makro dimana akan tidak memungkinkan untuk dapat mengeksplor konteks mikro dari perilaku anti persaingan yang dikarenakan pelanggaran kekayaan intelektual. Sumber sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang juga didominasi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, dimana sebagian besar dari mereka berusia kurang dari 30 tahun. Hal tersebut sudah terkenal menjadi faktor keterbatasan.

Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah bahwa meskipun penelitian ini meliputi konteks teori anomie kelembagaan, ada satu variabel prediktor yang tidak digunakan. Budaya nasional materialisme yang berkaitan dengan uang (ketertarikan mendalam pada uang) tidak tercakup di penelitian ini karena tidak adanya variabel tersebut dari sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Data yang disediakan dari sumber-sumber sekunder tentunya tidak tanpa adanya kekurangan. Ada data yang hilang untuk beberapa negara, di mana penelitian ini menggunakan analisis nilai hilang untuk dapat mengakomodasi keterbatasan tersebut. Meskipun mungkin untuk memiliki hasil-hasil yang lebih baik dalam upaya memprediksi konteksnya, esensi dari apa yang sebenarnya terjadi mungkin tidak benar dapat sepenuhnya terungkap secara sempurna. Pengurangan sampel

negara-negara akhirnya akan mengurangi kekuatan statistic yang dibutuhkan untuk HLM dalam melakukan analisisnya.

Model *multi-leveling* yang digunakan dalam penelitian ini, HLM, meskipun banyak manfaat dan keuntungan dengan menggunakan pendekatan tersebut dalam memahami konteks budaya yang tersarang, terstruktur, juga memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin menjadi penyebab kekhawatiran ketergantungan HLM pada metodologi berbasis regresi. Pendekatan HLM tidak mengizinkan bagi data tingkat-nasional yang hilang karena akan dihapus secara otomatis dalam proses perhitungannya, yang tentunya menyebabkan penggunaan data yang berkurang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah linier. Meskipun pendekatan saat ini tidak menunjukkan penafsiran model prosentase varian yang kuat, hal itu mungkin karena data yang sebenarnya lebih baik ditafsirkan dengan pendekatan non-linear. Kekhawatiran ini mengungkapkan tentang mengapa beberapa hipotesis yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil HLM mengenai arah hubungan dan signifikansi statistiknya.

Tanpa keraguan, keterbatasan yang disebutkan tidak merupakan semua keterbatasan. Pemahaman tentang perusahaan berperilaku menyimpang atau tidak menyimpang akan menguji teori anomie kelembagaan secara konstan. Teori lainnya mungkin bisa menyajikan hasil yang mengarah pada pemahaman lebih baik tentang dinamika penelitian ini. Namun penelitian ini masih tetap relevan karena sifatnya umum dan berkonteks makro.

6.4 Saran Penelitian Lanjutan

Penelitian baru ini, pada perilaku anti persaingan dalam konteks perspektif teori anomie kelembagaan, menawarkan wawasan baru dari apa yang bisa penelitian di masa depan lakukan. Hal ini karena terbatasnya penelitian serupa mengenai konteks lintas-nasional pada perilaku perusahaan menyimpang seperti anti persaingan. Ditambah belum lagi adanya ketersediaan penelitian yang dipublikasikan dari lingkup ini dengan menggunakan pemodelan yang tepat untuk data yang sangat terstruktur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa efek utama dan efek moderasi berbeda satu sama lain, sedangkan teori anomie kelembagaan itu sendiri menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan yang sama. Orientasi individualisme, tingkat pembangunan ekonomi, dan tingkat perpecahan keluarga adalah indikator yang menunjukkan tanda-tanda yang terpengaruh jenis industri. Perusahaan yang menangani kekayaan intelektual sebagai sumber operasionalisasi mereka merupakan titik baik untuk bisa dipelajari lebih lanjut.

Beberapa hasil lainnya dari variabel teori anomie kelembagaan ini berbeda tajam. Orientasi prestasi dan orientasi pencapaian pendidikan menunjukkan peluang besar untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami lebih dari apa yang teori anomie kelembagaan bisa jelaskan.

Penelitian lanjutan pada konteks perilaku anti persaingan karena pelanggaran kekayaan intelektual bisa menggunakan pendekatan HLM yang berbeda. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini, model *intercept-as-outcome* hanyalah salah satu dari model yang tersedia untuk memprediksi variabel dependen yang bersangkutan. Model *Slope-as-outcome* dan *intercept-and-slope-as-outcome* dapat digunakan dalam upaya memahami hubungan perilaku menyimpang perusahaan. Dengan data yang lebih baik, bahkan model *fixed effect* mungkin dapat terbukti lebih berguna daripada model *random effect* yang digunakan dalam penelitian ini. Pemodelan hirarki longitudinal linier juga akan dapat sangat berguna bagi para peneliti dalam memahami perilaku anti persaingan yang mengarah pada mengapa perusahaan-perusahaan di seluruh dunia melakukan perilaku anti persaingan akibat pelanggaran kekayaan intelektual dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

[Article] // Daily Yomiuri. - March 15, 1994.

Audretsch David B. The Dynamic Role of Small Firms: Evidence from the U.S. [Journal] // Small Business Economics. - 2002. - pp. 13-40.

Bame-Aldred Charles W. [et al.] National Culture and Firm-Level Tax Evasion [Journal] // Journal of Business Research. - 2011.

Batra Geeta, Kaufmann Daniel and Stone Andrew H. W. The Firms Speak: What the World Business Environment Survey Tells Us about Constraints on Private Sector Development [Report] : World Bank Report. - Washington D.C. : Working Paper Series, 2003.

Baumol William J. and Ordover Janusz A. Use of Antitrust to Subvert Competition [Journal] // Journal of Law and Economics. - 1985. - pp. 247-265.

Baumol William J. When is Inter-Firm Coordination Beneficial? The Case of Innovation [Journal] // International Journal of Industrial Organization. - 2001. - pp. 727-737.

Bayer AG versus Biovail Corporation [Case] : 200-CV-128-WCO. - [s.l.] : U.S. District LEXIS 23907, March 27, 2001.

Blau Peter M. and Duncan Otis Dudley The American Occupational Structure [Book]. - New York : The Free Press, 1978.

Bolton Patrick, Brodley Joseph F. and Riordan Michael H. Predatory Pricing: Strategic Theory and Legal Policy [Journal] // Georgetown Law Review. - 2000. - pp. 2300-2301.

Bone Robert G. A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification [Journal] // California Law Review. - 1998. - pp. 273-279.

Braxton John M. Deviancy from the Norms of Science: The Effects of Anomie and Alienation in the Academic Profession [Journal] // Research in Higher Education. - 1993. - pp. 417-436.

Cave Martin Anti-Competitive Behaviour in Spectrum Markets: Analysis and Response [Journal] // Telecommunications Policy. - 2010. - pp. 251-261.

Chamlin Mitchell B. and Cochran John K. Assessing Messner and Rosenfeld's Institutional Anomie Theory: A Partial Test [Journal] // *Criminology*. - 1995. - pp. 411-429.

Cullen John B., Parboteah K. Praveen and Hoegl Martin Cross-National Differences in Managers' Willingness to Justify Ethically Suspect Behaviors: A Test of Institutional Anomie Theory [Journal] // *Academy of Management Journal*. - 2004. - pp. 411-421.

Daboub Anthony J. [et al.] Top Management Team Characteristics and Corporate Illegal Activity [Journal] // *The Academy of Management Review*. - 1995. - pp. 138-170.

Dominian J. Marital Breakdown and the Future of Marriage [Article] // *Long Range Planning*. - April 2, 1984. - pp. 77-84.

Durkheim Emile *Suicide: A Study in Sociology* [Book]. - London : Taylor & Francis e-Library, 2005.

Durkheim Emile *The Division of Labor in Society* [Book]. - New York : The Free Press, 1997.

Elkind Peter and McLean Bethany The Feds Close in on Enron [Article] // *Fortune Magazine*. - September 2002. - pp. 36-37.

Esping-Andersen Gøsta *The Three Worlds of Welfare Capitalism* [Book]. - Oxford : Blackwell Publishing, 1990.

Fagan Patrick *The Real Root Cause of Violent Crime: The Breakdown of a Family* [Conference] // *The Center for Constructive Alternatives Seminar*. - Hillsdale : Heritage Foundation, 1995. - p. 157.

Ferraris Medical, Inc. versus Azimuth Corp. [Case]. - [s.l.] : U.S. District LEXIS 13589, July 24, 2002.

Fridolfsson Sven-Olof and Stennek Johan *Hold-Up of Anti-Competitive Mergers* [Journal] // *International Journal of Industrial Organization*. - 2005. - pp. 753-775.

Gelles Richard J., Levine Ann and Bassis Michael S. *Sociology: An Introduction* [Book]. - [s.l.] : McGraw Hill, 1995.

Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Survey Instruments & Data - New Mexico State University [Online] // New Mexico State University. - May 14, 2010. - March 12, 2012. - <http://business.nmsu.edu/programs-centers/globe/instruments/>.

Golodner Adam M. Antitrust, Innovation, Entrepreneurship, and Small Business [Journal] // Small Business Economics. - 2001. - pp. 31-35.

Greguras Fred M. Misuse of Copyright as Defense to Software Infringement Claim [Journal] // Computer Law & Security Review. - 1990. - pp. 35-36.

Grossmann Volker Advertising, in-house R&D, and growth. [Journal] // Oxford Economic Papers. - 2008. - pp. 168-191.

Grossmann Volker and Steger Thomas M. Anti-Competitive Conduct, In-House R&D, and Growth [Journal] // European Economic Review. - 2008. - pp. 987-1008.

Gual Jordi and Mas Nuria Industry Characteristics and Anti-Competitive Behavior: Evidence from the EU [Online] // IESE Business School. - March 2007. - March 15, 2012. - <http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0687-E.pdf>.

Handgards, Inc. versus Ethicon, Inc. [Case] : 743 F.2d 1282. - [s.l.] : United States Court of Appeals, Ninth Circuit, December 20, 1983.

Hofmann David A. An Overview of the Logic and Rationale of Hierarchical Linear Models [Journal] // Journal of Management. - 1997. - pp. 723-744.

Hofmann David A. and Gavin Mark B. Centering Decisions in Hierarchical Linear Models: Implications for Research in Organizations [Journal] // Journal of Management. - 1998. - pp. 623-641.

Hofstede Geert and Hofstede Gert Jan 6 Dimensions for Website [Online] // Geert Hofstede. - March 23, 2012. - <http://www.geerthofstede.nl/media/651/6%20dimensions%20for%20website.xls>.

Hofstede Geert Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations [Book]. - Thousand Oaks : Sage Publications, 2001.

Hofstede Geert The Cultural Relativity of the Quality of Life Concept [Journal] // Academy of Management Review. - 1984. - pp. 389-398.

House Robert J. [et al.] Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Cultures [Book]. - Thousand Oaks : Sage Publications, 2004.

Hui C. Harry and Triandis Harry C. Individualism-Collectivism: A Study of Cross-Cultural Researchers [Journal] // Journal of Cross-Cultural Psychology. - 1986. - pp. 225-248.

Husted Bryan W. Wealth, Culture, and Corruption [Journal] // Journal of International Business Studies. - 1999. - pp. 339-360.

Imi Atsushi (Anti-)Competitive Effect of Joint Bidding: Evidence from ODA Procurement Auctions [Journal] // Journal of the Japanese and International Economies. - 2004. - pp. 416-439.

Inglehart Ronald Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies [Book]. - Princeton : Princeton University Press, 1997.

Jackson Terence Cultural Values and Management Ethics: A 10-Nation Study [Journal] // Human Relations. - 2001. - pp. 1267-1302.

Jallab Mustapha Sadni and Kobak James B. Antidumping as Anticompetitive Practice Evidence from the United States and the European Union [Journal] // Journal of Industry, Competition and Trade. - 2006. - pp. 253-275.

Javidan Mansour [et al.] Conceptualizing and Measuring Cultures and Their Consequences: A Comparative Review of GLOBE's and Hofstede's Approaches [Journal] // Journal of International Business Studies. - 2006. - pp. 897-914.

Kanwar Sunil and Evenson Robert E. Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change? [Journal] // Yale Economic Growth Center. - June 2001.

Khatri Naresh, Tsang Eric W. K. and Begley Thomas M. Cronyism: A Cross-Cultural Analysis [Journal] // Journal of International Business Studies. - 2006. - pp. 61-75.

Kotabe Masaaki and Wheeler Kent W. Perceptions of Anticompetitive Practices in Japan and the Market Performance of Foreign Firms [Journal] // Journal of International Management. - 1998. - pp. 173-200.

Kreft Ita G. G., Leeuw Jan de and Aiken Leona S. The Effect of Different Forms of Centering in Hierarchical Linear Models [Report] : Technical Report. - Research Triangle Park : National Institute of Statistical Sciences, 1994.

Lemley Mark A. Property, Intellectual Property, and Free Riding [Journal] // Texas Law Review. - 2005. - pp. 1031-1089.

Lemley Mark A. Rational Ignorance at the Patent Office [Journal] // Northwestern University Law Review. - 2001. - pp. 1501-1536.

Leung Kwok Editor's Introduction to the Exchange Between Hofstede and GLOBE [Article] // Journal of International Business Study. - November 6, 2006. - p. 881.

Luke Douglas A. Multilevel Modeling [Book]. - Thousand Oaks : Sage Publications, 2004.

- Mandich Giulio Venetian Patents (1450-1550) [Journal] // Journal of the Patent Office Society. - 1948. - pp. 166-224.
- Martin Kelly D., Cullen John B. and Parboteeah K. Praveen Deciding to Bribe: A Cross-Level Analysis of Firm and Home Country Influences on Bribery Activity [Journal] // Academy of Management Journal. - 2007. - pp. 1401-1422.
- Martin Kelly D., Johnson Jean L. and Cullen John B. Organizational Change, Normative Control Desinstitutionalization, and Corruption [Journal] // Business Ethics Quarterly. - 2009. - pp. 105-130.
- McCarthy J. Thomas Lanham Act Section 43(a): The Sleeping Giant Is Now Wide Awake [Journal] // Law and Contemporary Problems. - 1996. - pp. 45-74.
- Menard Scott A Developmental Test of Mertonian Anomie Theory [Journal] // Journal of Research in Crime and Delinquency. - 1995. - pp. 136-174.
- Merton Robert K. Anomie, Anomia, and Social Interaction [Book Section] // Anomie and Deviant Behavior / book auth. Clinard Marshall Barron. - New York : The Free Press, 1964.
- Merton Robert K. Social Structure and Anomie [Journal] // American Sociological Review. - 1938. - pp. 672-682.
- Merton Robert K. Social Theory and Social Structure [Book]. - New York : The Free Press, 1968.
- Messner Steven F. and Rosenfeld Richard Crime and the American Dream [Book] / ed. Howard Eve. - Belmont : Thomson Wadsworth, 2007. - 4th Edition. - 0-534-61958-4.
- Messner Steven F. and Rosenfeld Richard Political Restraint of the Market and Levels of Criminal Homicide: A Cross-National Application of Institutional-Anomie Theory [Journal] // Social Forces. - 1997. - pp. 1393-1416.
- Meurer Michael J. Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation [Journal] // Boston College Law Review. - 2003. - pp. 509-544.
- Motta Massimo Competition Policy: Theory and Practice [Book]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
- Myers Gary Litigation as a Predatory Practice [Journal] // Kentucky Law Journal. - 1992. - pp. 565-594.
- National Center for Health Statistics Marriage and Divorce [Online]. - October 5, 2010. - March 12, 2012. - <http://www.cdc.gov/nchs/fastats/divorce.htm>.

Neubaum Donald, Mitchell Marie and Schminke Marshall Firm Newness, Entrepreneurial Orientation, and Ethical Climate [Journal] // Journal of Business Ethics. - 2004. - pp. 335-347.

North Douglass C. Institutional Change and Economic History [Journal] // Journal of Institutional and Theoretical Economics. - 1989.

North Douglass C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance [Book]. - Cambridge : Cambridge University Press, 1990.

Orru Marco Anomie: History and Meaning [Book]. - London : Allen and Unwin Hyman, 1987.

O'Sullivan Arthur and Sheffrin Steven M. Economics: Principles in Action [Book]. - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2005.

Passas Nikos Global Anomie, Dysnomie, and Economic Crime: Hidden Consequences of Neoliberalism and Globalization in Russia and Around the World [Journal] // Social Justice. - 2000. - pp. 16-44.

Porter Michael The Competitive Advantage of Nations [Book]. - New York : The Free Press, 1998.

Posner Grip-Pak Inc. versus Illinois Tool Works Inc. [Report]. - 1982.

Ralston D. A. [et al.] The Impact of National Culture and Economic Ideology on Managerial World Values: A Study of the United States, Russia, Japan, and China [Journal] // Journal of International Business Studies. - 1997. - pp. 177-207.

Raudenbush Stephen W. [et al.] HLM 7: Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling [Book]. - Lincolnwood : Scientific Software International, 2011.

Raudenbush Stephen W. and Bryk Anthony S. Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods [Book]. - Thousand Oaks : Sage Publications, 2002.

Raysman Richard [et al.] Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis [Book]. - New York : Law Journal Seminars Press, 1998.

Rest James R. and Narvaez Darcia The College Experience and Moral Development [Book Section] // Handbook of Moral Behavior and Development / book auth. Kurtines William M., Gewirtz Jacob and Lamb Jacob L.. - New Jersey : Psychology Press, 1991.

Rest James R. Moral Development: Advances in Research and Theory [Book]. - New York : Praeger Publishers, 1986.

Rivette Kevin G. and Kline David Discovering New Value in Intellectual Property [Article] // Harvard Business Review. - January 2000. - pp. 57-58.

Robertson Chris and Fadil Paul A. Ethical Decision Making in Multinational Organization: A Culture Based Model [Journal] // Journal of Business Ethics. - 1999. - pp. 385-392.

Rosenfeld Richard and Messner Steven F. Markets, Morality, and an Institutional Anomie Theory of Crime [Book Section] // The Future of Anomie Theory / book auth. Passas Nikos, Agnew Robert and Merton Robert K.. - Boston : Northeastern University Press, 1997.

Sappington David E. M. and Sidak J. Gregory Incentives for Anticompetitive Behavior by Public Enterprises [Journal] // Review of Industrial Organization. - 2003. - pp. 183-206.

Savolainen Jukka Inequality, Welfare State, and Homicide: Further Support for the Institutional Anomie Theory [Journal] // Criminology. - 2000. - pp. 1021-1042.

Schoepfer Andrea and Piquero Nicole Leeper Exploring White-Collar Crime and the American Dream: A Partial Test of Institutional Anomie Theory [Journal] // Journal of Criminal Justice. - 2006. - pp. 227-235.

Schwartz Shalom H. Universals in the Content and Structure of Values [Book Section] // Advances in Experimental Social Psychology / book auth. Zanna M.. - New York : Academic Press, 1992.

Sherstyuk Katerina Some Results on Anti-Competitive Behavior in Multi-Unit Ascending Price Auctions [Journal] // Handbook of Experimental Economic Results. - 2008. - pp. 185-198.

Sidak J. Gregory Capital Subsidies, Profit Maximization, and Acquisitions by Partially Privatized Telecommunications Carriers [Journal] // Telecommunications Policy. - 2002. - pp. 287-294.

Smith Peter B. When Elephants Fight, the Grass Gets Trampled: The GLOBE and Hofstede Projects [Journal] // Journal of International Business Studies. - 2006. - pp. 915-921.

Snijders Tom A. B. and Bosker Roel J. Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling [Book]. - Thousand Oaks : Sage Publications, 2011.

Stack Steven and Eshleman J. Ross Marital Status and Happiness [Journal] // Journal of Marriage and Family. - 1998. - pp. 527-536.

Studenmund A. H. Using Econometrics: A Practical Guide [Book]. - New York : Harper Collins, 1992.

The World Bank GDP per capita (current US\$) [Online] // The World Bank. - March 12, 2012. - <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>.

The World Bank Tax revenue (% of GDP) [Online] // The World Bank. - March 12, 2012. - <http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS>.

Trompenaars Fons and Hampden-Turner Charles Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Global Business [Book]. - New York : McGraw Hill, 1998.

Tsoukas Haridimos Socio-Economic Systems and Organizational Management: An Institutional Perspective on the Socialist Firm [Journal] // Organization Studies. - 1994. - pp. 21-45.

Turner Jonathan H. The Institutional Order: Economy, Kinship, Religion, Polity, Law, and Education in Evolutionary and Comparative Perspective [Book]. - New York : Longman Pub Group, 1997.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Beyond 20/20 WDS [Online] // United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. - March 12, 2012. - <http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=185>.

United Nations Statistics Division Demographic and Social Statistics [Online] // United Nations Statistics Division. - March 12, 2012. - <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2009-2010.htm>.

Weir Charlie Merger Policy and Competition: An Analysis of the Monopolies and Mergers Commission's Decisions [Journal] // Applied Economics. - 1993. - pp. 57-66.

World Business Environment Survey World Business Environment Survey [Online] // International Finance Corporation. - 2000. - March 12, 2012. - <http://www.gcgf.org/ifcext/economics.nsf/Content/ic-wbes>.

Yankee Candle Co. versus Bridgewater Candle Co. [Case] : 687 F.2d 1173. - 2001.

Zahra Shaker A., Priem Richard L. and Rasheed Abdul A. The Antecedents and Consequences of Top Management Fraud [Journal] // Journal of Management. - 2005. - pp. 612-626.

Zhou Jessie Qi and Peng Mike W. Does Bribery Help or Hurt Firm Growth Around the World? [Journal] // Asia Pacific Journal of Management. - 2011.



LAMPIRAN

Sumber Variable

Pengukuran Variabel Dependen

Tindakan Anti Kompetitif (Sumber: World Bank World Business Environment Survey)

Please judge on a four point scale how problematic is the following factor for the operation and growth of your business. Anti-competitive practices by government or private enterprises:

- (1) No obstacle*
- (2) Minor obstacle*
- (3) Moderate obstacle*
- (4) Major obstacle*

Pengukuran Variabel Independen

Hipotesis Efek Utama Tingkat Perusahaan (Sumber: World Bank World Business Environment Survey)

Please judge on a four point scale how problematic are the following practices of your competitors for your firm? They violate my copyrights, patents or trademarks:

- (1) No obstacle*
- (2) Minor obstacle*
- (3) Moderate obstacle*
- (4) Major obstacle*

Efek Utama Tingkat Nasional (Sumber: Global Hofstede)

Budaya Nasional: Individualisme:

Individualism refers to the strength of the bonds people have with other within the society.

High Individualism: *lose connection with people, little sharing or responsibility. Tendency to use the "I" form more frequently, sometimes perceived as arrogant, self-centered. In a high individualist workplace, employees feel empowered to make their own decisions.*

Low Individualism: *strong group cohesion, harmony is "key." Tendency to use the "WE" form more frequently, sometimes perceived as indecisive, weak will, not assertive, not aggressive, hierarchical. In a low individualist workplace, employees tend to refer decisions back to their managers.*

Efek Utama Tingkat Nasional (Sumber: Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Survey)

Budaya Nasional: Orientasi Pencapaian (*Performance Orientation Societal Values*):

I believe that teen-aged students should be encouraged to strive for continuously improved performance.

- (1) *Strongly agree*
- (2)
- (3)
- (4) *Neither agree nor disagree*
- (5)
- (6)
- (7) *Strongly disagree*

I believe that major rewards should be based on:

- (1) *Only performance effectiveness*
- (2)
- (3)
- (4) *Performance effectiveness and other factors (for example, seniority and political connections)*
- (5)
- (6)
- (7) *Only factors other than performance effectiveness (for example, seniority and political connections)*

I believe that being innovative to improve performance should be:

- (1) *Substantially rewarded*
- (2)
- (3)
- (4) *Somewhat rewarded*
- (5)
- (6)
- (7) *Not rewarded*

I believe that people should set challenging goals for themselves.

- (1) *Strongly agree*
- (2)
- (3)
- (4) *Neither agree nor disagree*
- (5)
- (6)
- (7) *Strongly disagree*

Budaya Nasional: Orientasi Egalitarianisme (Gender Egalitarianism Societal Values):

I believe that boys should be encouraged to attain a higher education more than girls.

- (1) *Strongly agree*
- (2)
- (3)
- (4) *Neither agree nor disagree*
- (5)
- (6)
- (7) *Strongly disagree*

I believe that there should be more emphasis on athletic programs for:

- (1) *Boys*
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7) *Girls*

I believe that this society would be more effectively managed if there were:

- (1) *Many more women in positions of authority than there are now*
- (2)
- (3)
- (4) *About the same number of women in positions of authority as there are now*
- (5)
- (6)
- (7) *Many less women in positions of authority than there are now*

I believe that it should be worse for a boy to fail in school than for a girl to fail in school.

- (1) *Strongly agree*

- (2)
- (3)
- (4) *Neither agree nor disagree*
- (5)
- (6)
- (7) *Strongly disagree*

I believe that opportunities for leadership positions should be:

- (1) *More available for men than for women*
- (2)
- (3)
- (4) *Equally available for men and women*
- (5)
- (6)
- (7) *More available for women than for men*

Lembaga Sosial: Pembangunan Ekonomi (Sumber: The World Bank)

GDP per kapita (mata uang US\$). *GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars.*

Lembaga Sosial: Kebijakan Sosialisme (Sumber: The World Bank)

Pendapatan, tidak termasuk hibah (% dari GDP). *Revenue is cash receipts from taxes, social contributions, and other revenues such as fines, fees,*

rent, and income from property or sales. Grants are also considered as revenue but are excluded here.

Lembaga Sosial: Perpecahan Keluarga (Sumber: United Nations Statistics Division; National Centers for Health Statistics)

Tingkat perceraian per 1.000 orang. Current marriage to current divorce ratio measures the divorce rate by comparing the number of marriages to the number of divorces in a given year.

Lembaga Sosial: Pencapaian Pendidikan (Sumber: The World Bank)

Tingkat literasi, total dewasa (% dari orang berumur 15 tahun dan keatas). Adult literacy rate is the percentage of people ages 15 and above who can, with understanding, read and write a short, simple statement on their everyday life.

Pengukuran Kontrol Variabel

Ukuran Perusahaan (Sumber: World Bank World Business Environment Survey)

Firm size category:

- (1) Small*
- (2) Medium*
- (3) Large*

*Variance Influence Factors (VIF)***Tabel 1** Pelanggaran Properti Intelektual

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.479
Orientasi Pencapaian	1.695
Orientasi Egalitarianisme	2.155
Pembangunan Ekonomi	2.645
Kebijakan Sosialisme	1.680
Perpecahan Keluarga	1.790
Pencapaian Pendidikan	1.119

Tabel 2 Orientasi Individualisme

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.529
Orientasi Pencapaian	1.700
Orientasi Egalitarianisme	2.219
Pembangunan Ekonomi	3.033
Kebijakan Sosialisme	1.608
Perpecahan Keluarga	1.747
Pencapaian Pendidikan	1.102

Tabel 3 Orientasi Pencapaian

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.540
Orientasi Pencapaian	1.495
Orientasi Egalitarianisme	1.904
Pembangunan Ekonomi	2.909
Kebijakan Sosialisme	1.683
Perpecahan Keluarga	1.728
Pencapaian Pendidikan	1.149

Tabel 4 Orientasi Egalitarianisme

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.384
Orientasi Pencapaian	1.378
Orientasi Egalitarianisme	1.346
Pembangunan Ekonomi	2.098
Kebijakan Sosialisme	1.682
Perpecahan Keluarga	1.896
Pencapaian Pendidikan	1.146

Tabel 5 Pembangunan Ekonomi

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.351
Orientasi Pencapaian	1.498
Orientasi Egalitarianisme	1.635
Pembangunan Ekonomi	1.668
Kebijakan Sosialisme	1.390
Perpecahan Keluarga	1.853
Pencapaian Pendidikan	1.116

Tabel 6 Kebijakan Sosialisme

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.546
Orientasi Pencapaian	1.431
Orientasi Egalitarianisme	1.704
Pembangunan Ekonomi	2.411
Kebijakan Sosialisme	2.505
Perpecahan Keluarga	1.887
Pencapaian Pendidikan	1.160

Tabel 7 Perpecahan Keluarga

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.459
Orientasi Pencapaian	1.378
Orientasi Egalitarianisme	1.550
Pembangunan Ekonomi	2.406
Kebijakan Sosialisme	2.958
Perpecahan Keluarga	1.671
Pencapaian Pendidikan	1.158

Tabel 8 Pencapaian Pendidikan

Variabel	VIF
Orientasi Individualisme	1.486
Orientasi Pencapaian	1.416
Orientasi Egalitarianisme	1.678
Pembangunan Ekonomi	2.369
Kebijakan Sosialisme	2.902
Perpecahan Keluarga	1.674
Pencapaian Pendidikan	1.886